

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI
MASYARAKAT, PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)

**Skripsi
Untuk Mencapai Drajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :
Eka Sri Setyawati
31401700063**

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022M / 1443H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

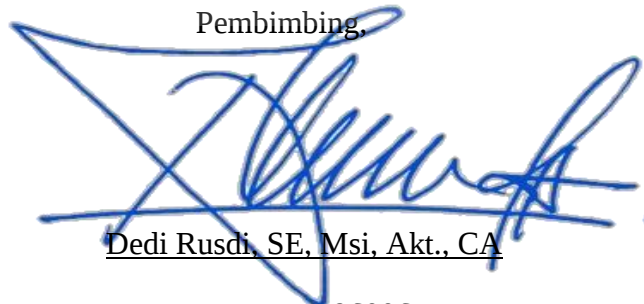
PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI
MASYARAKAT, PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)

Disusun Oleh :
Eka Sri Setyawati
31401700063

Penelitian ini telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke
hadapan sidang panitian ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 19 Januari 2020

Pembimbing,



Dedi Rusdi, SE, Msi, Akt., CA

NIK. 211496006

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI
MASYARAKAT, PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)

Disusun Oleh :

Eka Sri Setyawati

Nim : 31401700063

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada tanggal 28 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

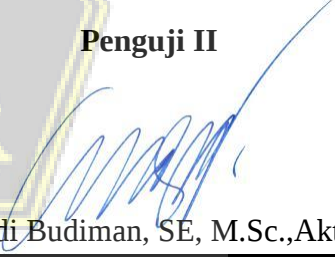

Dedi Rusdi, SE, Msi, Akt., CA

NIK. 211496006

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si., Akt


Judi Budiman, SE, M.Sc.,Akt

NIK : 211492004

NIK :211403015

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelara Sarjana Akuntansi tanggal 4 Mei 2021

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Dra. Winarsih, SE. M.Si

NIK : 211415029

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Sri Setyawati

NIM : 31401700063

Proram Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian untuk skripsi dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang) ”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarism* dengan cara yang tidak sesuai dengan etika atau tradisi keilmuan. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Eka Sri Setyawati

NIM 31401700063

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EkaSri Setyawati
NIM : 31401700063
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat asal : Dk. Sijeruk Ds. Pacet RT 03/ RW 01
Kec. Reban Kab. Batang
No. HP/Email : 085215213340 /

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Agustus 2022



Eka Sri Setyawati

3140170006

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Sri Setyawati

NIM : 31401700063

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat asal : Dk. Sijeruk Ds. Pacet RT 03/ RW 01
Kec. Reban Kab. Batang

No. HP/Email : 085215213340 /

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul ***“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”*** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Agustus 2022



Eka Sri Setyawati

31401700063

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

Jangan pernah menyepelkan do'a kedua orang tuamu karena berkat do'a merekalah yang mengantarkanmu menuju suatu jalan kesuksesan

Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, keberanianmu harus lebih banyak dari pada ketakutanmu

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar Ra'd :11)

Persembahan

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT. Skripsi ini kupersembahkan kepada

- ✓ Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Tudiyanto) dan Ibu Suwati yang selalu memberikan Do'a yang tak pernah ada hentinya di setiap sujudmu, jasa dan cinta kasih sayang yang telah diberikan dengan begitu tulus.
- ✓ Keluarga Tercinta
- ✓ Dosen Jurusan Akuntansi
- ✓ Sahabat dan teman-teman seperjuanganku
- ✓ Almamaterku

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of accountability, transparency, community participation, management, and allocation of village funds on community empowerment. In this study using saturated samples in sampling and test equipment in SPSS using version 26.0. The population used in this study is the village government which is involved in community empowerment in 15 villages located in Reban District, Batang Regency with a total sample of 75 respondents. The data collection technique used in this study is a questionnaire, the data analysis technique uses regression. The validity of the data was obtained through validity and reliability tests. The data used in this study were primary data. Empirical evidence obtained from this study shows that accountability, transparency, and community participation have no effect on community empowerment, while the management and allocation of village funds has a positive effect on community empowerment.

Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, Management, Village Fund Allocation and Community Empowerment



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan, dan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian menggunakan sampel jenuh di dalam pengambilan sampel dan alat uji dalam SPSS menggunakan versi 26.0. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang terlibat didalam pemberdayaan masyarakat pada 15 desa yang berada di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang dengan jumlah sampel sebanyak 75 respondent. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk pengelolaan dan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat



INTISARI

Penelitian ini menginvestigasi tentang dampak akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan, alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan kajian yang mendalam dan kritis terdapat lima hipotesis yaitu sebagai berikut ini : 1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat, 2) Transparansi berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat, 3) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat, 4) Pengelolaan berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat, 5) Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dan tokoh masyarakat pada 15 Desa di Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode sampel jenuh. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 responden. Metode analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 26.

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, transparansi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk pengelolaan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul ***PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*** Skripsi ini disusun untuk menunaikan salah satu syarat kelulusan program S-1 jurusan Akunansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa selama penyusunan praskripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dedi Rusdi, SE, Msi, Akt., CA_selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Bapak, Ibu, serta keluarga besar dan saudara-saudari peneliti atas do'a dan dukungan yang diberikan selama ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan kelas Della, Dessy, Dina, Ega, Denok dan anggota kelas E2 2017.
6. Seluruh Civitas Akademi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung,

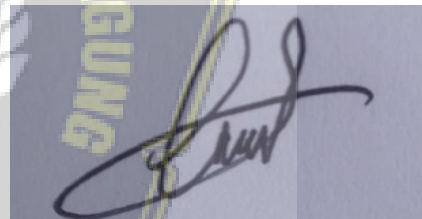
Semarang yang telah memberikan ilmunya

7. Seluruh pihak yang sudah membantu penyelesaian praskripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam praskripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Oleh karena itu dengan senang hati peneliti sangat mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga proposal penelitian ini bisa berguna bagi pembaca mengenai ilmu akuntansi.

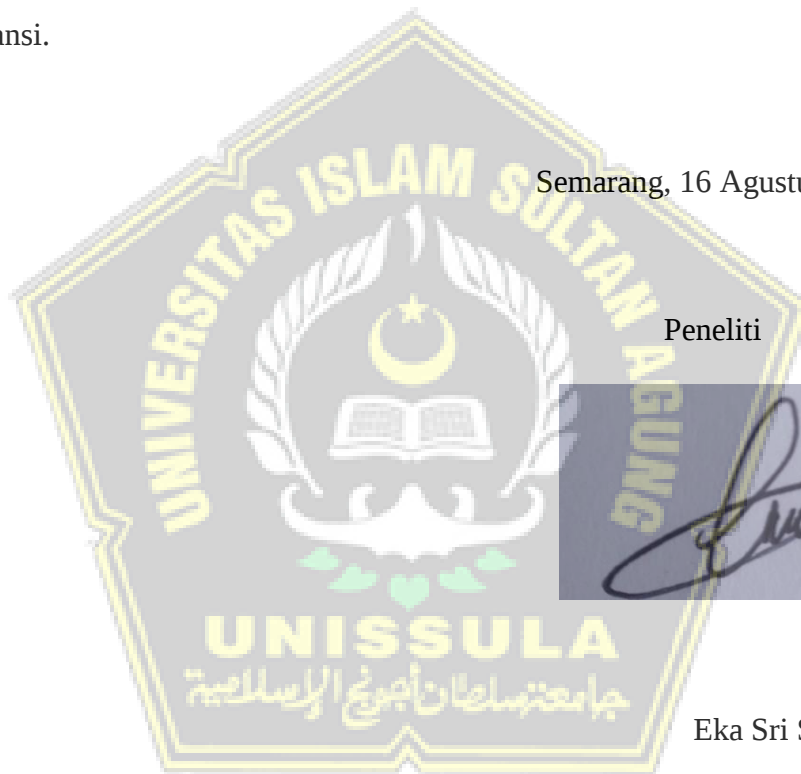
Semarang, 16 Agustus 2022

Peneliti



Eka Sri Setyawati

NIM : 31401700063



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK.....	viii
INTISARI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	9
2.1.2 Akuntabilitas	10
2.1.3 Transparansi.....	12
2.1.5 Penelolaan Alokasi Dana Desa	13
2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Hipotesis	25
2.4 Kerangka Penelitian.....	28
BAB III	30
3.1 Jenis Penelitian	30

3.2.1	Populasi.....	30
3.2.2	Sampel	30
3.3	Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4.1	Kuisisioner.....	33
3.5	Devinisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	35
3.5.1	Variabel Dependent (Y).....	35
3.5.2	Variabel Independent (x)	36
3.6	Teknik Analisis	38
3.6.1	Statistik Deskriptif	38
3.6.2	Uji Kualitas Data	39
3.6.2.1	Uji Reliabilitas	39
3.6.2.2	Uji Validitas.....	39
3.6.5	Pengujian Hipotesis	42
BAB IV		46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
4.1.1	Gambaran Lokasi Penelitian.....	46
4.1.2	Hasil Penyebaran Kuisisioner.....	46
4.1.3	Karakteristik Respondent.....	48
4.2	Tanggapan Respondent.....	49
4.3	Hasil Deskriptif Data	54
4.4	Hasil Uji Kualitas Data	58
4.4.1	Uji Reliabilitas	58
4.4.2	Uji Validitas.....	58
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik	60
4.5.1	Uji Normalitas.....	60
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.6	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	63
4.7	Pengujian Hipotesis	66
4.7.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	66
4.7.2	Uji F	68
4.7.3	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?	70
4.7.4	Pengaruh Transparansi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?	71
4.7.5	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat? ...	73
4.7.6	Pengaruh Pengelolaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?	74
4.7.7	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?	75

BAB V	77
PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Keterbatasan.....	78
5.3 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN - LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

2.1 Tahap Perencanaan.....	11
2.2 Tahap Penata Usahaan.....	11
2.3 Tahap Pertanggung Jawaban.....	12
2.4 Penelitian Terdahulu.....	19
3.1 Sampel Data.....	31
3.2 Penentuan Skor.....	34
3.3 Kriteria Penelitian Kuisisioner.....	34
3.4 Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat.....	35
3.5 Devinisi Operasional.....	37
4.1 Distribusi Penyebaran Kuisisioner.....	47
4.2 Data Sampel Penelitian.....	47
4.3 Karakteristik Respondent Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
4.4 Karakteristik Respondent Berdasarkan Usia.....	48
4.5 Karakteristik Respondent Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
4.6 Deskripsi Variabel Akuntabilitas.....	49
4.7 Deskripsi Variabel Transparansi.....	50
4.8 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat.....	51
4.9 Deskripsi Variabel Pengelolaan.....	52
4.10 Deskripsi Variabel Alokasi Dana Desa.....	52
4.11 Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat.....	53
4.12 Descriptive Statistics.....	55
4.13 Uji Reliabilitas.....	58
4.14 Uji Validitas	59

4.15	Uji Normalitas.....	61
4.16	Uji Multikolinearitas.....	62
4.17	Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.18	Regresi Linear Berganda.....	64
4.19	Uji T.....	66
4.20	Uji Simulatan (Uji F)	69
4.21	Uji Koefisien Determinasi.....	70



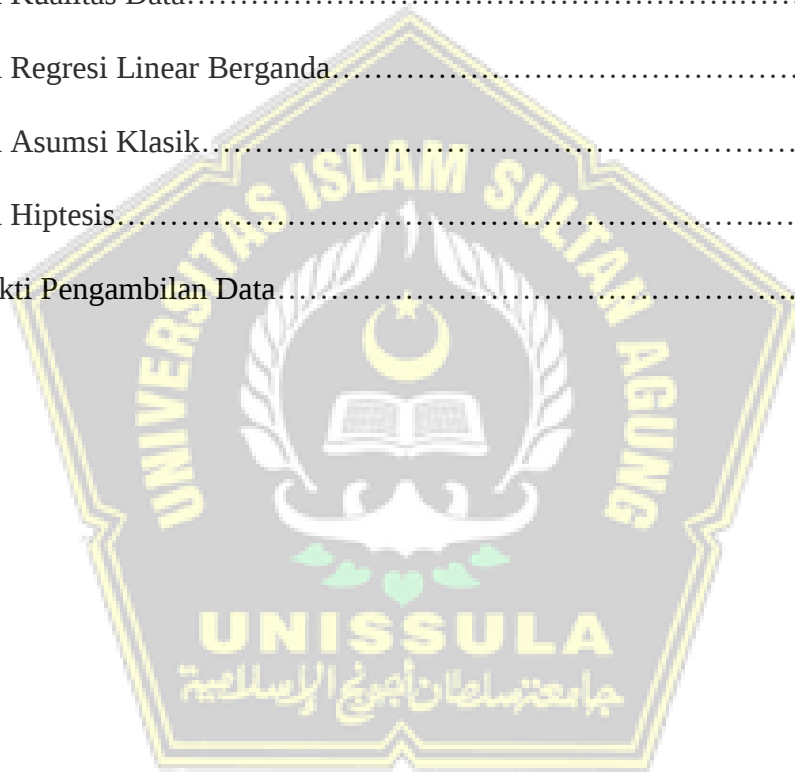
DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Penelitian.....	29
------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Populasi Penelitian.....	86
2. Kuisioner Penelitian.....	87
3. Surat Ijin Penelitian.....	91
4. Tabulasi.....	92
5. Uji Statistic Deskriptif.....	104
6. Uji Kualitas Data.....	104
7. Uji Regresi Linear Berganda.....	105
8. Uji Asumsi Klasik.....	106
9. Uji Hiptesis.....	107
10. Bukti Pengambilan Data.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Prinsip yang dilakukan didalam suatu otonomi daerah atau lingkungan yaitu menggunakan prinsip yang seluas - luasnya yaitu suatu pemberdayaan dan kesempatan bagi suatu daerah buat mengelola serta menggunakan sumber dayanya sebagai ideal sehingga bebas dari bias, kecurangan, kekuasaan yang luas dan diskresi, hal ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dan kuat. Pemerintah desa yang dikatakan lebih memahami dan mampu melihat kepentingan masyarakat dibandingkan pemerintahan kabupaten sebenarnya mempunyai persoalan yang bertambah kompleks serta lebih luas. Pembangunan pedesaan harus didasarkan pada masalah yang timbul sedang dihadapi serta prioritas pembangunan pedesaan yang sedang terjadi" (Prasitnok et al., 2017).

Dalam menjelang kewenangannya, pemerintah desa harus memiliki sumber penerimaan digunakan buat membiayai kegiatan yang tertulis di dalam (RABD), sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2014 yang merupakan salah satu sumber dalam penerimaan desa yaitu dana desa, seperti yang telah teratur di dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang berisi: Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN diberikan buat desa, desa yang mendapatkan transfer APBD kabupaten atau kota dapat menggunakan dananya buat membiayai semua kegiatan pemerintahan, yaitu buat pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan "(Ramadhani et al., 2019).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu suatu bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan, kewenangan untuk mengelola dana desa yang digunakan sebagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas harus sesuai pada suatu tujuan dari penggunaan dana desa tersebut, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satu upayanya dengan cara memberdayakan masyarakat. Akuntabilitas tersebut meliputi pemberian informasi – informasi keuangan serta aktifitas yang telah dilakukan instansi pemerintah yang transparan kepada masyarakat dan pengguna yang berorientasi pada kepentingan publik demi kualitas yang lebih baik. Adapun konsep akuntabilitas yaitu berdasarkan pada individu-individu maupun kelompok jabatan di dalam setiap klasifikasi jabatan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan - kegiatan yang telah dilakukannya. Sedangkan untuk fungsi akuntabilitas itu sendiri bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku berlaku saja. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas itu tetap harus memperhatikan penggunaan – penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, maupun ekonomis.

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan dengan memberikan informasi-informasi keuangan dengan jujur maupun terbuka terhadap masyarakat dengan pertimbangan – pertimbangan bahwasanya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap perundang-undangan (PP Pasal 25 Nomor 71 Tahun 2010)” (Putri., 2020).

Partisipasi masyarakat yaitu merupakan faktor – faktor keberuntungan dalam mempersiapkan pembangunan masyarakat desa. Partisipasi Masyarakat yaitu suatu peranan aktif di dalam publik terhadap software yang dilakukan di dalam pemerintahan, yang ditunjukan untuk mengontrol maupun mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan penyalahgunaan wewenang.

Pengelolaan alokasi dana desa yaitu suatu bagian yang sulit dipisahkan yang berasal dari pengelolaan keuangan yang ada didalam (APBDes). Alokasi dana desa bukanlah dana yang subsidi adapun tujuan pelaksanaan wewenang desa buat mengelola alokasi dana desa. Dalam sistem penyusunan desa yang bersumber mulai tekad masyarakat untuk menyatu melalui masyarakat. Keuangan desa digunakan buat pelaksanaan rencana – rencana terhadap sasaran yang telah ditetapkan sesuai nilai potensi yang sebenarnya atau aktual. Selain itu, pengelolaan alokai dana desa (VFA), tergolong rendah karena tidak efisien didalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban.

Pentingnya suatu pemberdayaan masyarakat untuk mengatur setiap perangkat desa harus bijak dalam mengelola dana desa agar anggarannya efektif dan efisien, seperti yang telah disusun didalam undang - undang nomer 17 2003 pasal 3 Ayat 3. berkaitan dengan negara, antara lain: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa - rasa keadilan dan apabila anggaran dana tersebut dikelola dengan cara yang baik maka hasil

kegiatan otonomi desa akan baik juga, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas begitupun sebaliknya jika anggaran tersebut dikelola dengan cara tidak baik, maka tidak akan jelas juga kegiatan dan output nya (hasil kegiatannya) yang efisien dan efektif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ataupun infrastruktur yang berada di dalam desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat merujuk terhadap serangkaian –serangkaian yang telah dilakukan secara sistematis dan mencerminkan tahapan – tahapan kegiatan suatu upaya untuk mengubah masyarakat yang kurang maupun belum berdaya dan berkemampuan menuju keberdayaan.

Riset gap sebelumnya mengungkapkan bahwa adanya beberapa pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat akuntabilitas transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan dan alokasi dana desa. Pertama yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu akuntabilitas. Penggunaan akuntabilitas harus mampu memberikan manfaat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syafi'i et al., 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2020). Didalam penelitiannya tersebut (Putri et al., 2020) menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Kedua yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu transparansi, transparansi yaitu salah satu aspek yang sangat diperhatikan di dalam pengelolaan dana desa, Dengan adanya keterbukaan informasi dan juga keterlibatan masyarakat desa di dalam musyawarah desa, maka program

pemberdayaan masyarakat dapat tercapai hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al.,2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati, et al., 2019), di dalam penelitiannya (Sukmawati, et al., 2019), menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Ketiga yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu partisipasi masyarakat baik di dalam proses perencanaan maupun menyampaikan suatu pendapat kepada pemerintah, untuk mencapai tujuan dari dana desa sendiri yaitu menyejahterakan masyarakat dimana partisipasi masyarakat ini dilaksanakan untuk mengupayakan masyarakat agar lebih mandiri lagi, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Putri et al.,2020) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ” (Umi Listyaningsih, 2016), di dalam penelitiannya (Umi Listyaningsih, 2016) menyatakan bahwasanya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat pedesaan dikecamatan nanggulan kabupaten kulonprogo, Yogyakarta. Keempat yang mempengaruhi pengungkapan pemberdayaan masyarakat yaitu pengelolaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Li (2010) sebelumnya. Mengungkapkan bahwasanya pengelolaan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. “Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh”(Faizatul Karimah., 2020) bahwa dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengelolaan tidak berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Kelima yang

mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu alokasi dana desa. Pemakaiannya tentang alokasi dana desa diharapkan memberikan keuntungan yang besar dengan megedepankan urusan perluasan serta pemberdayaan masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Sopian et al., 2019). Mengatakan alokasi dana desa berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari et al., 2015). berdampak positif bagi pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, untuk variabel yang dipergunakan didalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan dan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Jurnal utama yang dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu (Putri et al., 2015), untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, yang dalam variabel independen, mengambil variabel penelitian, untuk mengetahui ; Kemudian, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat ditambahkan variabel pengelolaan dan alokasi dana desa yang diperoleh dari penelitian (Sari et al., 2015). Berdasarkan dari latar belakang diatas sehinggakan disimpulkan bahwa penelitian ini yaitu berjudul; **PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang).**

1.2 Rumusan Masalah

Alokasi dana desa didalam rangka otonomi daerah khususnya memberdayakan desa buat mengusahkan rumah tangganya sendiri berbanding dengan

kebutuhannya saat upaya pemberdayaan masyarakat desa. Desa memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas-tugas publik. Dalam proses sentralisasi kekuasaan yang bertambah tinggi disertai dengan pendanaan dukungan sarana maupun prasarana yang memadai untuk menjadi desa yang mandiri. “ (Sopian et al., 2019) . Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa sudah banyak dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berikut;

- a. Bagaimanakah pengaruh Akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat?
- b. Bagaimanakah pengaruh Transparansi terhadap pemberdayaan masyarakat?
- c. Bagaimanakah pengaruh Partisipasi terhadap pemberdayaan masyarakat?
- d. Bagaimanakah pengaruh Pengelolaan terhadap pemberdayaan masyarakat?
- e. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka peneliti ini bertujuan untuk;

- a. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Partisipasi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- d. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan terhadap pemberdayaan masyarakat.

- e. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan dan referensi atau literatur di bidang akademik khususnya dibidang kajian administrasi Negara yang berkaitan dengan Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa (Add).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Masyarakat Desa

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat. Dan diharapkan nantinya masyarakat akan mampu turut serta dan aktif ke dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan-tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan mampu dijadikan acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Arifin, 2005) teori keagenan akan muncul akibat adanya kontrak kerja atas persetujuan bersama yang terjadi antara agent dan principal. Agen adalah pihak yang melakukan tugas-tugas tertentu bagi principal, sedangkan untuk prinsipal sendiri adalah pihak yang memberi imbalan kepada agen (Hendriksen dan Van Breda, 2001).

Menurut Lane sendiri (2003a) teori keagenan dapat diterapkan di dalam organisasi sektor publik. Dia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan, sedangkan menurut Bergman & Lane (1990), ia menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik sangat berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (asymmetric information)”(Wolfman et al., 2013).

Keterkaitanya teori keagenan dengan penelitian yang saya lakukan menimbulkan suatu kontrak antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan menggunakan teori keagenan diharapkan mampu kerjasama

antara masyarakat dengan pemerintahan.

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Suharto: 2006) akuntabilitas yaitu kebutuhan akan akuntabilitas atas pencapaian praktik pengelolaan sumber daya dan implementasi strategi yang diamanatkan bagi suatu entitas untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai terlihatnya catatan dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari, sedangkan Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban para pihak yang diberi tanggung jawab akan menjelaskan serta melaporkan segala kegiatan – kegiatan dan program yang telah dilaksanakan kepada pihak yang memberikan penugasan” (Putri et al., 2020).

2.1.2.2 Indikator Akuntabilitas

Dalam penelitian suatu kinerja keberhasilan didalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat menggunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan yaitu;

1. Pada saat tahap perencanaan ada beberapa indikator yang digunakan buat penjaminan akuntabilitas yaitu :
 - a. Desa memiliki adanya bukti yang tertulis saat mewujudkan suatu ketentuan
 - b. Sekdes menyusun dan merancang tentang peraturan APBDesa yang telah ditentukan berdasarkan RKPDesa memberikan hasilnya Kepala Desa.
2. Pada tahapan penatausahaan ada beberapa indikator yang digunakan buat memastikan akuntabilitas yaitu:

- a. Bendahara desa diharapkan mampu mencatat semua transaksi penerimaan, pengeluaran, dan mencatat penutupan pembukuan yang dilakukan pada akhir bulan
 - b. Bendahara desa diwajibkan mempertanggung jawabkan dana tersebut yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Ada beberapa indikator pada tahapan pertanggung jawaban yang digunakan buat menjamin akuntabilitas yaitu:
- a. Semua kegiatan yang dibiayai dari dana desa tertuang dalam (APBDesa) harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 201 terkait Pengelolaan Keuangan Desa, beberapa indikator yang digunakan buat mengukur penelitian ini,yaitu:

Tabel 2.1
Tahap Perencanaan

No	Indikator
1.	Perencanaan dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat
2	Pengelolaan sesuai dengan RAPBDesa
3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan Pertanggung jawaban
4	Hasil perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber: (HILYA ,,IZZA 2019)

Tabel 2.2
Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Bendahara desa mencatat setiap terjadinya transaksi pengeluaran dana

2	Bendahara desa diwajibkan mempertanggungjawabkan semua dana atas penerimaan maupun pengeluaran
---	--

Sumber: (HILYA, IZZA 2019)

Tabel 2.3
Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa diharapkan menyampaikan laporan-laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun
2	Laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang telah ditentukan atau sepakati.

Sumber: (HILYA, IZZA 2019)

Media akuntabilitas yang digunakan untuk memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian suatu tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, dikarenakan pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi” (Bansode et al., 2018).

2.1.3 Transparansi

2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo (2016) transparansi yaitu keterbukaan aparat pemerintahan untuk menyampaikan suatu informasi kepada public untuk mengenai pengelolaan sumber daya publik. Transparansi di dalam pelaksanaan pemerintah desa merupakan suatu hal-hal yang penting sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik, selain itu sebagai suatu usaha pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahannya. Transparansi yaitu terbentuknya akses bagi publik di dalam mendapatkan suatu

informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan, penyelenggaraan, serta pertanggung jawaban di dalam pengelolaan dana desa” (Putri et al., 2020).

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Hestiraldin menyatakan bahwa partisipasi yaitu kontribusi publik secara aktif dalam berbagai program, sebagai suatu sarana untuk menumbuhkan kohesifitas didalam masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki serta tanggungjawab baik pemerintah maupun masyarakat pada setiap program yang diadakan pemerintah. Partisipasi juga dapat diartikan dengan arti peran serta, di dalam keterlibatan maupun proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan – tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat “ (Putri et al., 2020).

2.1.5 Penelolaan Alokasi Dana Desa

2.1.5.1 Pengertian Pengelolaan

Menurut Arikunto (20016) pengelolaan menurut konsep dan teori dapat diartikan sebagai manajemen, pengaturan ataupun pengurusan. Menurut Stoner (dalam Senaratne & Ruwanpura, 2016) manajemen yaitu, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, dari itu pengertian pengelolaan adalah rangkaian kegiatan, pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai tujuan”(Boedijono et al., 2019).

2.1.5.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dalam kompetensinya menciptakan kepercayaan pada desa untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kepentingan desa itu sendiri didalam rangka memberdayakan masyarakat buat menjalani kehidupannya. Masyarakat desa semakin sejahtera dalam kompetensinya menciptakan kepercayaan desa buat mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan desa didalam rangka memberdayakan masyarakat desa buat menjalani kehidupannya. Masyarakat desa semakin sejahtera.

Desa memiliki peran penting, terutama di dalam membangun pelayanan publik di desa. Desentralisasi adalah Kewenangan yang besar dengan dana, sarana serta prasarana yang cukup diperlukan untuk membangun otonomi dari desa biyasa ke desa yang mandiri. Seperti didalam UU Desa No.6 Tahun 2001, posisi pemerintah desa telah diperkuat. Adanya undang-undang desa harus mengatur penguatan posisi desa sebagai kewenangan desa untuk memajukan dan meningkatkan status masyarakat desa. (Sopian et al., 2019).

2.1.5.3 Undang – Undang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Pengesahan undang-undang ini menggantikan Surat Keputusan (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kota. Undang-undang itu sendiri menetapkan bahwa desa adalah masyarakat hukum dengan kekuasaan terbatas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan nenek moyang, adat istiadat setempat, serta pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan negara.

Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa atau kepala pemerintahan desa, yang dikenal dengan nama lain, didukung oleh lembaga desa sebagai bagian dari pemerintahan desa' (Wolfman et al., 2013).

2.1.5.4 Administrasi Keuangan

Menurut The Liang Gie (1987, h.18) administrasi keuangan adalah konsep pengaturan keuangan sebuah proses, serangkaian terstruktur dalam bentuk penganggaran, identifikasi sumber daya biaya, melalui penggunaan, akuntansi dan pelaporan. Berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan: akuntabilitas, efisiensi atau efektivitas dalam menghimpun dan menggunakan dana tersebut. Manajemen keuangan biasanya melakukan beberapa fungsi manajemen kunci. Salah satu fungsi manajemen yang disebutkan Terry dalam Siagian (1990, hlm. 105) adalah perencanaan, pengorganisasian, tindakan (menggerakkan atau memanipulasi), dan mengendalikan (monitoring). Atau, bisa disebut P.O.A.C" (Karimah et al., 2020).

2.1.5.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa seperti dalam Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2014, Pasal 93 terkait dengan semua kegiatan termasuk perencanaan, pelaporan serta pertanggung jawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) yaitu Proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam

jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu sebagai kegiatan buat menjalankan APB Desa didalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.

3. Tata kelola

Tata Kelola yaitu kegiatan bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, serta prosedur buat memperoleh informasi keuangan

4. Pelaporan

Pelaporan yaitu kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi terkait tentang hasil dari pekerjaan yang dilakukan sebelumnya dalam suatu periode sebagai sebuah wujud pelaksanaan tanggung jawab atas kewajiban yang telah diberikan sebelumnya.

5. Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab pengurusan pemerintahan oleh desa kewenangan adalah metrik yang diperlukan untuk mengukur kepatuhan pelayanan yang dilakukan dengan skala nilai standar yang telah diterapkan dilingkungan masyarakat.

2.1.5.6 Tugas Pengelolaan Keuangan Desa

Sedangkan di dalam tugas – tugas peneglolaan keuangan desa itu sendiri terdiri dari emapt bagian yaitu;

1. Pelakasana Kegiatan

2. Sekertaris Desa

3.Kepala Desa

4.Bendahara Desa

Untuk tugas-tugas bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa yakni menjadi berikut; melakukan semua pembayaran yang berkaitan dengan desa, melakukan semua pencatan pengeluaran serta pemasukan.

2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.6.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wahjudin (2011), pemberdayaan yaitu upaya dari faktor-faktor yang berasal dari luar tatanan agar tatanan tersebut mampu berkembang. Menurut Noor (2011), pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan ekonomi sejalan dengan nilai masyarakatnya yang bertujuan buat melahirkan pemikiran baru didalam pembangunan partisipatif” (Boedijono et al., 2019).

Pemberdayaan masyarakat Menurut Sedarmayanti (2014:80) ada dua kecenderungan dalam konsep pemberdayaan: Proses ini sering dilihat sebagai tren yang mendasari apa arti pemberdayaan, menyoroti proses yang menginspirasi, mendorong dan memotivasi individu dengan kemampuan atau pemberdayaan untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka. Komposisi ini sering dianggap sebagai tren sekunder dalam arti pemberdayaan” (Sopian et al., 2019).

2.1.6.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut;

1. Perbaikan Kelembagaan (Better foundation)

Dengan meningkatkan suatu kegiatan atau perilaku, diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan dan juga mengembangkan jaringan kemitraan

bisnis di desa.

2. Perbaikan Usaha (Better Business)

Didalam perbaikan usaha juga harus memperbaiki pendidikan, karena perbaikan pendidikan sangat diperlukan, dalam upaya perbaikan yang dilaksanakan.

3. Perbaikan Lingkungan (Better Environment)

Perbaikan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan rendahnya pendapatan, sehingga perlu dilakukan perbaikan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan baik secara fisik maupun sosial.

4. Perbaikan Kehidupan (Better Living)

Perbaikan kehidupan yaitu untuk meningkatkan tingkat pendapatan akan meningkatkan kondisi kehidupan semua masyarakat.

5. Perbaikan Masyarakat

Kehidupan yang baik sangat dibutuhkan, diperlukan dapat dapat mengarah pada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

2.1.6.3 Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa prinsip di dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesenjangan

Prinsip kesetaraan adalah suatu prinsip yang perlu dihormati didalam suatu proses pemberdayaan masyarakat, yang dimaksud kesetaraan disini adalah pemerataan melalui masyarakat dengan organisasi yang memprogramkan pemberdayaan masyarakat, untuk baik pria maupun wanita..

2. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam program-program partisipatif yang direncanakan, dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Pencapaian level tersebut membutuhkan waktu dan proses partisipatif dengan fasilitator yang terlibat secara mendalam dalam pemberdayaan masyarakat

3. Prinsip kesewadayaan

Prinsip keswadayaan adalah tidak menargetkan orang miskin sebagai objeknya, tetapi orang miskin sebagai objeknya, walaupun dengan kapasitas yang kecil. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah bisnis mereka, menangkap keadaan lingkungan, mempunyai tenaga kerja serta bersedia memenuhi standar sosial. Semua ini perlu ditemukan sebagai modal awal bagi suatu proses pemberdayaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian sebelumnya terangkai dalam tabel adalah seperti berikut;

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Judul Dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan Masyarakat - Variabel Independent : ✓ Dana desa ✓ Akuntabilitas ✓ Transparansi ✓ Partisipasi	✓ akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kenaikan maupun pengurangan tingkat pemberdayaan masyarakat . ✓ Transparansi pengelolaan dana

	DANA DESAPADA DESA SONGANB KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI.(Tahun 2020, Peneliti Ade Ayu Anggreni Putri, I Wayan Sudiana, dan I Putu Deddy Samtika Putra)” .	masyarakat - Sampel - Metode ✓ metode slovin	desa semakin tinggi, sebaliknya jika transparansi pengelolaan dana desa rendah maka pemberdayaan masyarakat akan turun.
2	“PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDIDI DESA PANDANREJO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU). (Tahun Penelitian 2019. Peneliti Elisabeth Ero Raja Kede)”.	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan masyarakat - Variabel Independent : ✓ Alokasi dana desa - Sampel - Metode ✓ deskriptif kuantitatif	✓ Alokasi DanaDesa dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat desa. ✓ Peningkatan pemerataan pendapatan, peluang usaha bagi masyarakat
3	“PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:P ERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Tahun 2 Peneliti Agung Maulana, Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi dan Ayu Andini)”.	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan masyarakat - Variabel Independent : ✓ Pengelolaan alokasi dana desa ✓ Maqashid Syariah - Sampel ✓ Data APBDes 2015 - Metode ✓ deskriptif kualitatif	✓ untuk menghitung anggaran desa,peneyuanain pengeluaran. ✓ Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD. ✓ Tujuan penggunaan dana desa yang disampaikan kepada perangkat – perangkat desa serta organisasi masyarakat menurut hasil perencanaan dan musyawarah pembangunan.
4	“EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan Masyarakat	✓ Tahapan Perencanaan serta pelaksanaan

	UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO (Tahun 2019. Peneliti Boedijono, Kusumaningrum, Dan Venantya Asmandani)".	- Variabel Independent : ✓ Efektifitas ✓ Pengelolaan ✓ Dana desa - Sampel ✓ ADD Anggaran 2016 - Metode ✓ Kualitatif - Kuantitatif	- keuangan desa. ✓ Proses perencanaan melibatkan masyarakat ✓ Implementasi keuangan desanya masih adanya kendala terkait dengan sumber daya manusia.
5	“ PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Tahun 2019. Peneliti Aditya Achmad Fathony, Asep Sopian)".	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan masyarakat - Variabel Independent: ✓ Aloksi dana desa - Sampel ✓ Alokasi Dana Desa ✓ 45 responden - Metode ✓ Regresi Linear Sederhana ✓ Korelasi Koefisien Determinasi	✓ Penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) semakin relevan ✓ Pengalokasian Dana Desa dapat memberikan kontribusi yang positif ✓ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa menjadi lebih baik lagi
6	“PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). (Peneliti Risya Novita Sari, Heru Ribawanto,dan Mohammad Said).	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan masyarakat - Variabel Independent : ✓ Pengelolaan alokasi dana desa - Sampel ✓ Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ngasem tahun anggaran 2014. - Metode	✓ Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngasem Masih kurang sempurna. ✓ Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih

		- Deskriptif	terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, ✓ Sehingga akan Dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya
7	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN 2017. Peneliti Dr. Dies Nurhayati, M.Pd.)	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan masyarakat ✓ Pembangunan - Variabel Independent : ✓ Efektifitas ✓ Pengelolaan alokasi dana desa - Sampel ✓ alokasi dana desa 2017 - Metode	✓ Masih belum maksimalnya penggunaan dana desa lantaran dari pengamatan dan permasalahan yang muncul, desa banyak yang ragu dalam penggunaan ✓ SDM yang ada di desa juga menjadi salah satu faktor belum maksimalnya penggunaan dana desa.
8	Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Tahun 2018. Peneliti Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution)	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan masyarakat - Variabel Independent : ✓ Pengelolaan dana desa - Sampel ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di desa Tetehosi Sorowi	✓ Sumber daya manusia yang dimiliki desa tetehosi sorowi belum memadai dalam mengelola keuangan desa di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa yang

		- Metode ✓ Deskriptif	tidak maksimal karena adanya Ngeluaran tambahan untuk di kerjakan oleh pihak ketiga. ✓ partisipasi masyarakat dinilai masih rendah .
9	PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) (Tahun 2020 . Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie)	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan masyarakat - Variabel Independent : ✓ Keuangan desa ✓ Desa - Sampel ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) - Metode ✓ Deskriptif Kualitatif	✓ Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, sudah sesuai normatif dan administrasi alokasi dana desa ✓ Sedangkan untuk peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon masih belum maksimal.
10	ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA 2016. (Tahun 2016. Peneliti Yulius Ferdinand Noel Nusi, Dr. M. Yamin Noch, SE., M. SA dan Victor Pattiasina, SE., Akt., M.SA., CA)	- Variabel Dependent : ✓ Pembangunan Desa - Variabel Independent : ✓ Efektivitas ✓ Pengelolaan ✓ Alokasi Dana Desa - Sampel ✓ Sampel dalam penelitian ini menggunakan	✓ Tidak ada kesesuaian pembagian APBDes antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realisasi di pemerintah Desa, yang mana pada pasal 100 PP No.43 tahun

		teknik pengambilan sampel aksidenta - Metode	2014, memberikan ketentuan 70% dari APBDes adalah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan paling banyak 30% untuk operasional kepala kampung dan juga Badan Musyawara Kampung (BMK).
11	AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER. (Tahun Peneliti . Peneliti Dwi Febri Arifiyanto Taufik Kurrohman)	- Variabel Dependent : ✓ Transparasi - Variabel Independent : ✓ Akuntabilitas ✓ Pengelolaan dana desa - Sampel - Metode	✓ Perencanaan program ADD di 10 desa se-Kecamatan Ambulsari secara bertahap telah menerapkan konsep pembangunan partisipatif masyarakat pedesaan ✓ Dalam pelaksanaan program ADD menerapkan Prinsip Partisipasi, Responsif dan Transparansi.. ✓ Pertanggung jawaban program ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis sudah cukup baik

12	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). (Peneliti Rina Indrawati Syafi'i, Abdul Wahid Mahsuni dan Afifudin. Tahun 2018)	- Variabel Dependent : ✓ Pemberdayaan Masyarakat - Variabel Independent : ✓ Akuntabilitas ADD ✓ Kebijakan desa ✓ Kelembagaan desa - Sampel - Metode	✓ Adanya pengaruh Yang signifikan Antara variabel Pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat. ✓ Adanya pengaruh Yang signifikan Antara variabel kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. ✓ Tidak ada pengaruh Yang signifikan Antara variabel kelem bagaandesa terhadap pemberdayaan masyarakat.
----	---	--	--

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan salah satu jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana untuk digunakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas harus didasarkan pada tujuan dari penggunaan dana

desa tersebut, yakni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satu upayanya dengan cara memberdayakan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syafi'I et al., 2018) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

2. Pengaruh transparansi terhadap pemberdayaan masyarakat

Transparansi yaitu merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan teori keagenan tentang asimetri informasi, di mana masyarakat selaku prinsipal tidak mendapatkan informasi yang sama dengan pemerintah desa selaku agen, dengan adanya transparansi ini diharapkan masyarakat mampu mendapatkan informasi – informasi secara actual dan lengkap, sehingga terindar dari adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat

3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya manusia desa terhadap pengelolaan dana desa terjadi sebab adanya tuntutan

bahwa masyarakat harus ikut serta dalam setiap prosesnya. Partisipasi masyarakat ini baik dalam proses perencanaan maupun menyampaikan pendapat kepada pemerintah.

Peneliti yang dilakukan oleh (Putri et el.,2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Partisipasi berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

4. Pengaruh pengelolaan terhadap pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan Dana Desa dapat melalui perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan sehingga mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang di berdayakan dan masyarakat tersebut mampu mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri dan mampu berpartisipasi melalui berbagai macam aktivitas.

Didalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Ii, 2010) mengenai pengaruh antara pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh antara pengelolaan terhadap pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Pengelolaan berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat

5. Alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui suatu perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan dapat mengendalikan kegiatan masyarakat yang di berdayakan dan masyarakat tersebut mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kesadaran diri serta berpartisipasi melalui berbagai kegiatan. Didalam penelitian yang dilakukan oleh (Sopian et al., 2019) mengenai pengaruh aloksi dana desa mendapatkan hasil bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka secara teoritis pengelolaan aloksi dana desa dengan pemberdayaan masyarakat terdapat pengeruh. Oleh karena itu, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H5 : Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

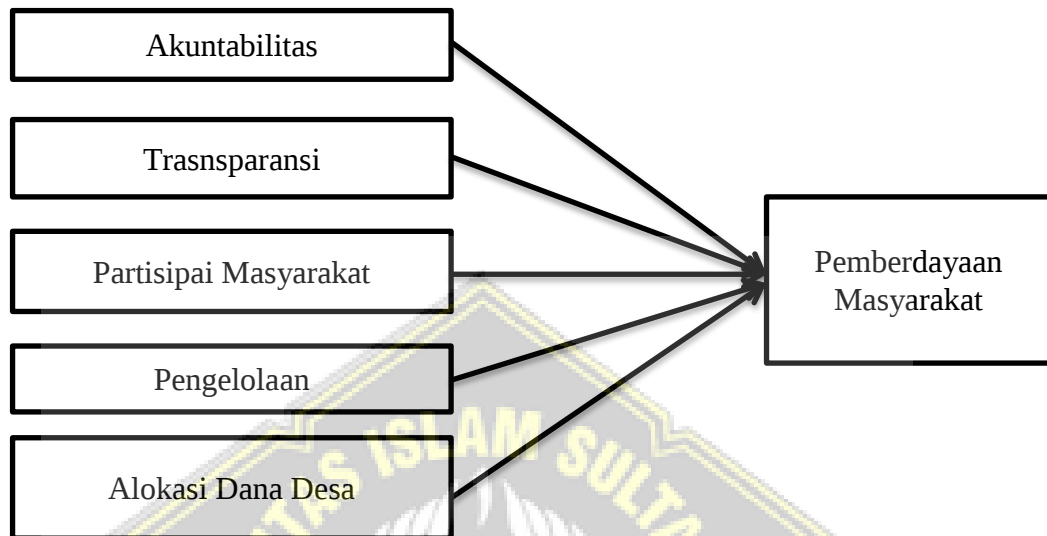
2.4 Kerangka Penelitian

Peneliti ini menggunakan teori keagenan. Teori keagenan yaitu akan muncul akibat adanya kontrak kerja atas persetujuan bersama yang terjadi antara agent dan principal. Hubungan tersebut berupa *principal* dan *agent* yang ingin memaksimalkan utilitasnya masing-masing sehingga dapat terjadi pertentangan. Adapun teori stewardship yaitu menggambarkan situasi di mana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu tetapi bertujuan untuk mencapai tujuan hasil kuncinya untuk kepentingan organisasi.

Menurut Sugiyono (2014), menyatakan bahwa: Kerangka berfikir adalah sintesis dari hubungan antara variabel-variabel agregat dari berbagai teori yang telah dijelaskan” (Sopian et al., 2019). Adapun gambaran kerangka pemikiran yang berakitan dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan, alokasi danadesa dan pemberdayaan masyarakat seperti dibawah ini:

Gambar 2.3

Kerangka Penelitian



Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada kecamatan reban kabupaten batang)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif didalam penyusunannya dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi di mana survei ini dilakukan terdiri dari 15 desa di kecamatan reban kabupaten batang. Informasi yang diperoleh secara kualitatif dan kuantitatif saling mendukung. Peneliti mengumpulkan data menggunakan kuesioner (Sari et al., 2015).

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiono (2016: 119). Populasi yaitu daerah penyearataan yang umum berlaku dari objek maupun subjek dapat ditarik kesimpulan, dengan jumlah serta karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh” (Ramadhani et al., 2019). Berlandaskan pengertian diatas, ada 15 desa yang ada di kecamatan reban dijadikan tempat buat melakukan penelitian.

3.2.2 Sampel

Sugiyon (2019) berpendapat bahwa populasi adalah area umum dari subjek dan objek serta karakteristik tertentu. Populasi didalam penelitian ini yaitu perangkat desa, LPMD serta tokoh masyarakat yang mengetahui tentang akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan alokasi dana desa serta pemberdayaan masyarakat.

Sampel yaitu unsur mulai jumlah serta karakteristik kepemilikan dalam suatu populasi (Sugiyono, 2019). Metode penelitian ini menggunakan sampling

jenuh. Sampling jenuh adalah ketika teknik pengambilan sampel menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Survei menggunakan sampel hingga 75 responden, termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (Kaur Keuangan) dan LPMD. dan tokoh masyarakat. Dibawah ini yaitu merupakan sampel dari data kuesioner:

Tabel 3.1

Sampel Data

1	Desa Pacet	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris desa ✓ Bendahara desa ✓ Lembaga Pemberdayaan Masyrakat (LPMD) ✓ Tokoh Masyrakat
2	Desa Mojotengah	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
3	Desa Cablikan	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
4	Desa Ngroto	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
5	Desa Adinuso	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
6	Desa Ngadirejo	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
7	Desa Tambakboyoy	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
8	Desa Reban	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa

		✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
9	Desa Padomasan	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
10	Desa Kalisari	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
11	Desa Semampir	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
12	Desa Karanganyar	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
13	Desa Sukomangli	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
14	Desa Kumesu	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat
15	Desa Kepundung	✓ Kepala Desa ✓ Sekertaris Desa ✓ LPMD ✓ Tokoh Masyarakat

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis serta sumber data yang dipergunakan yaitu data primer atau mentah, menurut Anwar Sanusi (2011:104), “Data primer atau mentah adalah data yang pertama kali direkam dan dikumpulkan oleh peneliti”. Data referensi utama untuk tinjauan ini adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada para aktor yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan akuntabilitas desa di kabupaten Reban. Selain data primer yang dibutuhkan kita juga membutuhkan sekunder. Data

sekunder yaitu data data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikumpulkan serta dicatat secara tidak langsung (Aria H, 2019).

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Kuisisioner

Kuisisioner adalah daftar berisi serangkaian pertanyaan tentang masalah atau area untuk diselidiki. Sementara itu, Menurut S. Nasution, kuesioner yang baik yang biasa disebut kuesioner yaitu skala Likert "daftar pertanyaan yang didistribusikan untuk mengisi dan mengembalikan atau menjawab mereka di bawah pengawasan peneliti dengan adanya variabel independen. Jadi untuk indikator itu sendiri yakni merupakan salah satu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan berbentuk sampel untuk kemudian diisi sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Dari beberapa sampel yang telah didapatkan akan diketahui hal tersebut akan berdampak positif maupun berpengaruh negative dengan menggunakan skala liter "(Sigiyono, 2013).pendapat, serta pandangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok orang. Kuisisioner disebarkan kepada 75 orang. Kuisisioner berisi daftar pertanyaan mengenai akuntabilitas, transparansi, partisipasi Pengelolaan, ADD dan pemberdayaan masyarakat. Dibawah ini merupakan bentuk menyelidiki dampak-dampaknya:

a) Penentuan Skor

Penentuan skor adalah nilai respon yang diberikan oleh seorang responden. Hal yang harus dilakukan yaitu menetapkan skor untuk setiap jawaban yang akan diberikan. Di bawah ini yaitu skala penilaian yang dimanfaatkan untuk

pencarian.

Tabel 3.2
Penentuan Skor

Skala	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Tidak Setuju (TS)	3
Sangat Tidak Setuju (STS)	2
Netral (N)	1

b) Nilai ideal (kriteria)

Nilai ideal adalah nilai yang digunakan untuk menghitung skor, mengukur penilaian, dan menentukan jumlah jawaban yang tersedia. Buat mengukur jumlah skor (kriteria) ideal untuk semua item ini, Anda dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Skor Kriteria} = \text{Skor Tertinggi} \times \text{Jumlah Responden}$$

Skor tertinggi untuk survai ini yaitu 5

c) Rating Skala

Skala penilaian digunakan untuk mengetahui hasil dari data kuesioner umum dan keseluruhan yang diperoleh dari kuesioner evaluasi (kuesioner).

Dengan kriterianya seperti dibawah ini:

Tabel 3.3
Kriteria Penelian Kuisiomer

Nilai Jawaban	Skala
81 – 100	Sangat Setuju (SS)
61 – 80	Setuju (S)
41 – 60	Tidak Setuju (TS)
21 – 40	Sangat Tidak Setuju (STS)
0 – 20	Netral (N)

d) Presentase Persetujuan

Untuk memahami persentase jawaban seluruh responden dapat menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dengan Keterangan sebagai berikut :

p : prosentase

f : Frekuensi dari setiap jawaban

n : Skor total ideal

100 : Bilangan tetap

3.5 Devinisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Sedangkan untuk variabel dependent dan variabel independent, digunakan pada penelitian ini. Variabel terikat (Y) yaitu pemberdayaan masyarakat dan variabel bebasnya adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan alokasi dana desa.

3.5.1 Variabel Dependent (Y)

Variabel terikat yaitu hasil dari adanya variabel bebas. Variabel terkait untuk penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat (Y), hasil yang diperoleh individu ataupun kelompok individu didalam suatu instansi sesuai dengan kemampuan serta komitmennya didalam upaya mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat

No	Item Indeks Pemberdayaan Masyarakat
A	Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat

1.	Penyelenggaraan pemerintah desa serta pemberdayaan masyarakat meningkat
2	Tersedapatnya dokumen perencanaan desa
3	Jumlah penataan lingkungan pemukiman pedesaan
4	Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (unit)
5	Menurunnya prosentase RT miskin, menjadi (%)
6	Meningkatnya pendayagunaan teknologi tepat guna
7	Terdapat buku tentang profil desa dan pedoman pengelolaan pemerintah desa
8	Jumlah penguatan sistem di desa pendukung P2MBG
9	Meningkatkan pengukuhan institusi Posendah di desa-desa sasaran / desa-desa Kelurahan dan P2MBG
10	Pemberian makanan ringan untuk anak SD/MI (pelajar)
B	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah
11	Penguatan keuangan pemerintahan desa
12	Terlaksananya tertib administrasi keuangan desa
13	Adanya bantuan dedikasi perangkat desa yang periode jabatannya telah berakhir atau meninggal (kades)
14	Adanya penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (orang)
15	Tertib administrasi keuangan desa telah terlaksana
16	Terlaksananya Penyelesaian kasus Tanah Kas Desa (bidang)
17	Tercepatan penyesuaian peraturan wilayah yg mengatur mengenai desa
18	Tersosialisasinya tatanan undang- undang yang menata desa
19	Terlaksananya anugerah tunjangan darma pada perangkat desa yang berhenti kala jabatannya atau meninggal
20	Pembagian subsidi kerugian buat sekretaris desa yang melengkapi persyaratan buat penunjukannya merupakan pegawai negeri
21	Terlaksananya anugerah tambahan penghasilan permanen ketua desa dan perangkat desa
22	Terlaksananya pemilihan kepala desa
23	Terlaksananya pengangkatan perangkat desa
	Jumlah Item Indeks 23

Sumber:(Lakip 2013)

3.5.2 Variabel Independent (x)

Variabel bebas yaitu variabel yang baik adanya modifikasi atau terjadinya variabel terikat (terkait) didalam penelitian ini variabel x nya yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pengelolaan, alokasi dana desa.

Tabel 3.5
Devinisi Operasional

No	Variabel	Defisi	Indicator	Skala
1	Pemberdayaan Masyarakat (Y)	a. Pemberdayaan pada sektor pendidikan terkhusus bagi anak- anak b. pemberdayaan sektor usaha kecil c. Pemberdayaan sektor pertanian d. Pemberdayaan sektor kesehatan	1. Membuka sekolah-sekolah baru bagi anak-anak 2. Melakukan kunjungan ke panti asuhan 1. Memberikan donasi kapital bagi sector-sektor usaha kecil 2. Membuat grup bagi sektor usaha kecil 1.Membatu wrga dalam memasarkan output keterampilan 1.Memberikan penyuluhan kesehatan 2.Memberikan pengobatan gratis	Ordinal
2	Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk menyampaikan suatu pertanggung jawaban, seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak. (Bastian, 2010)	1. Penggunaan laporan. 2. Melaporkan secara terbuka,cepat dan tepat. 3. Penyusunan ADD mempertimbangkan adanya Publik. 4. Laporan ADD rahasia. 5. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD	Skala
3	Transparansi (X2) Fay, Daniel Lenox (2019)	Prinsip yang kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi yang berhubungan	1. Pengumuman ADD 2. Sosialisasi Program 3. Meningkatkan kepedulian terhadap rakyat 4. Pengumuman	Skala

		dengan penyelenggaraan pemerintahan. (Sujarweni, 2015)	dilakukan tepat waktu 5. Pengumuman mudah di dapatkan	
4	Partisipasi Masyarakat (X3)	Adanya Keterlibatan warga melalui terciptanya komitmen & nilai-nilai diantara warga supaya termotivasi menggunakan bertenaga dalam acara yg direncanakan. (etal., Yulica et al., 2018)	1. Kemampuan warga buat terlibat pada pada proses pembuatan keputusan pada pengelolaan dana desa. 2. Akses warga untuk menyampaikan pendapat menurut proses pengambilan keputusan	a. Diskusi publik b. Media Massa c. Votting
5	Pengelolaan (X4)		1. Penggunaan dana ADD yang terkendali 2. Kemampuan tim pada pelaksana ADD	Skala
6	ADD (X5)	Dana yang di peroleh APBD dari kabupaten / kota APBD tersebut berasal dari dana keuangan yang telah dialokasikan untuk kabupaten/kota.	1. Jelas 2. Responsibilitas 3. Kesertaan 4. Kinerja tim pelaksana	Skala

Sumber (Hariyani, Desi 2018), (Fay, Daniel Lenox 2019), (Sari, et al 2018), (Sitorus, 2014).

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu merupakan suatu statistik yang digunakan untuk menganalisis nilai-nilai statistik dari hasil penelitian yaitu dengan cara

menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran variabel dalam penelitian yang mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan kemencengan distribus (*skewness*) (Ghozali, 2016).

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2016), reliabilitas adalah instrumen kuesioner atau survei yang merupakan indikator dari suatu variabel atau komponen. Kuesioner atau survei adalah *reliable* atau *handal* jika jawaban seseorang atas pertanyaan-pertanyaan ini konsisten atau stabil. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran suatu item pertanyaan konsisten atau tidak berbeda ketika diukur kembali pada subjek yang sama.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan pengukuran satu kali atau, dimana pengukuran hanya dilakukan satu kali, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau korelasi antara jawaban atas pertanyaan yang diberikan diukur. Reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan *reliable* apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

3.6.2.2 Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2016), uji validitas digunakan untuk mengukur validitas kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika berisi pertanyaan-pertanyaan yang

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas yang digunakan didalam penelitian ini yaitu Korelasi *Product Moment*, yaitu untuk mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat oleh peneliti, peneliti menggunakan cara melakukan korelasi antar butir skor pertanyaan dengan total variabel jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka butir indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas adalah alat buat memeriksa apakah variabel atau residualnya pada contoh regresi berdistribusi normal. Sebuah data penelitian yang baik yaitu apabila datanya berdistribusi normal. Ada dua cara didalam mendeteksi apakah residual berdistribusi normal maupun tidak normal yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016).

Uji normalitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Kolmogorov Smirnov test. Apabila data hasil perhitungan one-sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai diatas 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data dari perhitungan Kolmogorov-Smirnov 1 sampel menghasilkan nilai dibawah 0,05 maka model regresi tidak memenuhi standar asumsi normalitas (Ghozali, 2016). Uji statistik Kolmogorov-Smirnov test menurut (Ghozali, 2016), dapat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) data terdistribusi secara normal.

- b. Jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis alternatif (HA) data tidak terdistribusi secara normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji multikolinearitas merupakan model regresi yang dibuat untuk memeriksa adanya hubungan antara variabel independen yang ditemukan. Suatu acuan regresi dikatakan teratur bila masih ada hubungan antar variabel bebas.

Adapun untuk tujuan uji multikolinearitas yaitu untuk memeriksa nilai toleransinya serta nilai variance inflation factor (VIF). Model regresi terbebas menurut multikolinearitas,

- a. Jika mempunyai nilai toleransi $\geq 0,1$ atau $VIF \leq 10$ tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut
- b. Jika mempunyai nilai toleransi $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, artinya terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut” (Putri et al., 2020).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji normalitas dan uji multikolinieritas yaitu melakukan uji heteroskedastisitas, adapun tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain terjadi dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2016), jika varian dari residual didalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau sama, maka akan disebut homoskedastisitas, sedangkan apabila berbeda maka akan disebut sebagai heteroskedastisitas. Dalam sebuah penelitian model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada

penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji glejser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2016), dan apabila variabel independen signifikan secara statistik maka akan mempengaruhi variabel dependen maka terjadi heteroskedastisitas, Sebaliknya, jika tingkat signifikansi melebihi tingkatan harapan 5%, model regresi tidak termasuk heteroskedastisita.

3.6.4 Analiasi Regresi Linear Berganda

Menurut (Putri et al., 2020). Didalam penelitian salah satunya menggunakan teknik analisis linier berganda. Teknik analisis ini berfungsi untuk menilai arah dan besarnya pengaruh dari variabel independennya. Maka dari itu untuk persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagaimana berikut ini (Sugiyono, 2012):”

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

Y = Pemberdayaan Masyarakat

α = Konstata

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi variabel

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Partisipasi Masyarakat

X4 = Pengelolaan

X5 = Alokasi Dana Desa

e = Standar Error

3.6.5 Pengujian Hipotesis

3.6.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji t dipergunakan untuk menampilkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependennya. (Ghozali, 2018).

1) Hipotesis yang diuji:

$H_0 : \beta_i = 0$ tidak adanya hubungan linier antar variabel $H_a : \beta_i \neq 0$ terdapat hubungan linier diantara variabel

2) Tingkat Signifikansi standard $\alpha = 5\%$ (0,05).

3) Kriteria pengambilan keputusan

a. Apabila probabilitas $< 5\%$ (0,05) dan arah koefisien β sesuai dengan arah hipotesis, maka H_0 ditolak, H_a diterima.

b. Apabila probabilitas $> 5\%$ (0,05), maka H_0 diterima, H_a ditolak.

3.6.5.2 Uji F

Uji yang dipakai buat memahami signifikansi metode *fixed effect* untuk diuji memakai uji statistik F. Uji F akan dilaksanakan buat mengetahui seluruh efek variable-variable independen secara bersamaan juga serentak terhadap variabel dependent menggunakan taraf signifikansi sebanyak 95% atau dalam $\alpha = 5\%$

Mengandaikan F hitung menggunakan nilai kritisnya. Rumus statistik uji F sebagai berikut;

$$F_{ht} = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

K = Total Variabel Independent

N = Total Observasi

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka merupakan H_0 ditolak, minimal terdapat satu diantara variabel – variabel independen yg berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya” (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel – variabel independen secara bersamaan atau serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel – variabel independen yang digunakan didalam model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - Y)^2}$$

Dimana ESS (Explained of Sum Square), TSS (Total Sum of Square), $\bar{Y}_i$ yaitu estimasi dari Y_i adalah rata - rata variabel dependen. R^2 sama dengan 0, artinya tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan-sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya apabila R^2 sama dengan 1, maka prosentase

sumbangan-sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen” (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dan objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Reban salah satu kecamatan berada di kabupaten Batang. Secara geografis Reban terletak antara 109°50'20" sampai 109°55'29" BT dan 7°1'54 "sampai 7°11'28" BT. "Total luas Lintang Selatan dan wilayahnya adalah 4.633,39 hektar.

Batas – batas kecamatan reban yaitu :

- a. Utara Kecamatan Pecalungan Dan Kecamatan Limpung.
- b. Timur Kecamatan Tersono Dan Kecamatan Bawang.
- c. Selatan Kabupaten Banjarnegara.
- d. Barat Kecamatan Blado.

4.1.2 Hasil Penyebaran Kuisisioner

Kajian ini menganalisis dampak akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan dan alokasi dana desa (tambahan) terhadap pemberdayaan masyarakat. (Studi kasus di Lebanon) kecamatan Batan) Kabupaten).Data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil jawaban kuisisioner yang disebarkan kepada responden yaitu kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa ketua lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dan tokoh masyarakat. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (*Field Survey*).

Distribusi penyebaran kuesioner di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Nama Desa	Kuisiomer Disebar	Kuisiomer Kembali
1	Desa Pacet	5	5
2	Desa Mojotengah	5	5
3	Desa Cablikan	5	5
4	Desa Ngroto	5	5
5	Desa Adinuso	5	5
6	Desa Ngadirejo	5	5
7	Desa Tambakboyo	5	5
8	Desa Reban	5	5
9	Desa Padomasan	5	5
10	Desa Kalisari	5	5
11	Desa Semampir	5	5
12	Desa Karanganyar	5	5
13	Desa Sukomangli	5	5
14	Desa Kumesu	5	5
15	Desa Kepundung	5	5
	Total	75	75

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari 75 (100%) kuesioner yang di sebar , 75 (100%) yang di terima kembali. Dari kuesioner yang diterima kembali tidak ada kuesioner yang tidak sah sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah berjumlah 75 (100%). Berikut adalah rincian data kuesioner yang sudah diperoleh:

Tabel 4. 2
Data Sampel Penelitian

Kuesioner	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	75	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang tidak lengkap	0	0
Kuesioner yang dapat diolah	100%	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

4.1.3 Karakteristik Respondent

Karakteristik respondent yang menjadi sampel di dalam penelitian ini yaitu; jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan, dan berikut ini karakteristik respondent menurut jenis kelamin, usia dan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Respondent Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	55	73,3
Perempuan	20	26,7
Total	75	100%

Sumber : Data primer yang diolah 2021

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas respondent dalam penelitian ini merupakan laki-laki, yaitu sebanyak 73,3%, bahwa dari hasil tersebut menunjukan bahwa dari 15 desa dalam penelitian ini, mayoritas perangkat desa, LPMD dan tokoh masyarakat yaitu laki-laki. Hal ini sejalan dengan pendapat dari dari Liyod Lueptow (dalam Santrock, 2008) bahwa laki-laki adalah pesaing yang ulet. Sedangkan perempuan Cherington (1994) menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih berkomitmen terhadap organisasi dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 4.4
Karakteristik Respondent Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
20-29	19	25.3%
30-39	28	37.3%
40-49	16	21.3%
50-59	10	13.3%
60-69	2	2.7%
Total	75	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah usia responden dalam penelitian ini terbanyak terdapat pada kategori usia 30-39 tahun yaitu dengan jumlah presentase 37,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari perangkat desa berusia antara 30-39 tahun.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
S1	5	6.7%
D3	3	4.0%
SMA/SMK	38	50.7%
SMP/MTS	29	38.7%
Total	75	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa bahwa respondent dengan pendidikan terakhir SMA/SMK memiliki frekuensi yang paling banyak disbanding dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebanyak 50,7%.

4.2 Tangapan Respondent

4.2.1 Deskripsi Variabel Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas pada penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor variabel akuntabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel Akuntabilitas

Kusio ner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Mean
	N (1)		STS (2)		TS (3)		S (4)		SS (5)		
Akuntabilitas											
X1.1	14	18,7					8	10,7	53	70,7	4,15
X1.2							9	12,0	66	88,0	4,88
X1.3							25	33,3	50	66,7	4,67

X1.4						20	26,7	55	73,3	4,73
X1.5	2	2,7				23	30,7	50	66,7	4,59
Rata-rata										4,60

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.6 di atas menjelaskan bahwa rata-rata indeks skor jawaban variabel akuntabilitas diperoleh sebesar 4,60. Berdasarkan hasil dari data diatas, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan tinggi. Kondisi tersebut menunjukan bahwa responden menganggap bahwa akuntabilitas relatif tinggi.

4.2.2 Deskripsi Variabel Transparansi

Variabel transparansi pada penelitian ini diukur dengan 7 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor variabel transparansi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Deskripsi variabel Transparansi

Kusio ner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Mean
	N (1)		STS (2)		TS (3)		S (4)		SS (5)		
Transparansi											
X2.1							31	41,3	44	58,7	4,59
X2.2	6	8,0					11	14,7	58	77,3	4,53
X2.3	14	18,7					15	20,0	46	61,3	4,04
X2.4							22	29,3	53	70,7	4,44
X2.5							31	41,3	44	58,7	4,59
X2.6	10	13,3					15	20,5	50	66,7	4,27
X2.7	14	18,7					19	25,3	42	56,0	4,00
Rata-rata											4,35

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.7 di atas menjelaskan bahwa rata-rata indeks skor jawaban variabel transparansi diperoleh sebesar 4,35 Berdasarkan hasil dari data diatas, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan tinggi. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa transparansi relatif tinggi.

4.2.3 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat

Variabel akuntabilitas pada penelitian ini diukur dengan 6 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor variabel partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8
Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat

Kusio ner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Mean
	N (1)		STS (2)		TS (3)		S (4)		SS (5)		
Partisipasi masyarakat											
X3.1							14	18,7	61	81,3	4,81
X3.2							23	30,7	52	69,3	4,69
X3.3	4	5,31					22	29,3	49	65,3	4,49
X3.4							10	13,3	65	86,7	4,87
X3.5							7	9,3	68	90,7	4,91
X3.6							18	24,0	57	76,0	4,76
Rata-rata											4,75

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.8 di atas menjelaskan bahwa rata-rata indeks skor jawaban variabel partisipasi masyarakat diperoleh sebesar 4,75. Berdasarkan hasil dari data diatas, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa partisipasi masyarakat relatif tinggi.

4.2.4 Deskripsi Variabel Pengelolaan

Variabel pengelolaan pada penelitian ini diukur dengan 12 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor variabel pengelolaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Deskripsi Variabel Pengelolaan

Kusion er	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Mean
	N (1)		STS (2)		TS (3)		S (4)		SS (5)		
Pengelolaan											
X4.1							15	20,0	60	80,0	4,80
X4.2							24	32.0	51	68,0	4,68
X4.3							10	13,3	65	86,7	4,87
X4.4							17	22,7	58	77,3	4,77
X4.5							16	21,3	59	78,7	4,79
X4.6							24	32.0	51	68,0	4,68
X4.7							18	24,0	57	76,0	4,76
X4.8							15	20,0	60	80,0	4,80
X4.9	5	6,7					14	18,7	56	74,7	4,55
X4.10	1	1,3					29	38,7	45	60,0	4,56
X4.11							32	42,7	43	57,3	4,57
X4.12							25	33,3	50	66,7	4,67
Rata-rata											4,70

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.9 di atas menjelaskan bahwa rata-rata indeks skor jawaban variabel pengelolaan diperoleh sebesar 4,70. Berdasarkan hasil dari data diatas, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan tinggi. Kondisi tersebut menunjukan bahwa responden menganggap bahwa pengelolaan relatif tinggi.

4.2.5 Deskripsi Variabel Alokasi Dana Desa

Variabel alokasi dana desa pada penelitian ini diukur dengan 10 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor variabel alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Deskripsi variabel Alokasi dana desa

Kusio	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Mea
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

ner	N (1)		STS (2)		TS (3)		S (4)		SS (5)		n
Alokasi dana desa											
X5.1							14	18,7	61	81,3	4,81
X5.2							16	21,3	59	78,7	4,79
X5.3							20	26,7	55	73,3	4,73
X5.4							15	20,0	60	80,0	4,80
X5.5							15	20,0	60	80,0	4,80
X5.6							31	41,3	44	58,7	4,59
X5.7							20	26,7	55	73,3	4,73
X5.8							12	16,0	63	84,0	4,84
X5.9							22	29,3	53	70,7	4,71
X5,10	1	1,3					28	37,3	46	61,3	4,57
Rata-rata											4,73

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.10 di atas menjelaskan bahwa rata-rata indeks skor jawaban variabel alokasi dana desa diperoleh sebesar 4,73. Berdasarkan hasil dari data diatas, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan tinggi. Kondisi tersebut menunjukan bahwa responden menganggap bahwa alokasi dana desa relatif tinggi.

4.2.6 Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Variabel pemberdayaan masyarakat pada penelitian ini diukur dengan 11 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor variabel pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11

Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Kusi oner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Mean
	N (1)		STS (2)		TS (3)		S (4)		SS (5)		
Pemberdayaan masyarakat											
Y1.1							7	9,3	68	90,7	4,91
Y1.2							8	10,7	67	89,3	4,89
Y1.3							11	14,7	64	85,3	4,85

Y1.4							17	22,7	58	77,3	4,77
Y1.5							21	28,0	54	72,0	4,72
Y1.6							13	17,3	62	82,7	4,83
Y1.7							15	20,0	60	80,0	4,80
Y1.8	3	4,0					14	18,7	58	77,3	4,65
Y1.9							6	8,0	69	92,0	4,92
Y1.10							16	21,3	59	78,7	4,79
Y1.11							11	14,7	64	85,3	4,85
Rata-rata											4,81

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.11 di atas menjelaskan bahwa rata-rata indeks skor jawaban variabel pemberdayaan masyarakat diperoleh sebesar 4,81. Berdasarkan kategori indeks skor *three box method*, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat relatif tinggi.

4.3 Hasil Deskriptif Data

Analisis statistic deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Dengan melakukan perhitungan statistik, maka dapat diketahui gambaran tentang budaya akuntabilitas, transparansi, patisipasi masyarakat, pengelolaan, alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat, adapun hasil deskripsi variabel-variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minim um	Maxim um	Mea n	Std. Deviasi on
Akuntabilitas	75	18,00	25,00	23,01	2,096
Transparansi	75	20,00	35,00	30,45	3,953
Partisipasi Masyarakat	75	25,00	30,00	28,53	1,455
Pengelolaan	75	48,00	60,00	56,49	2,943
Alokasi Dana Desa	75	40,00	50,00	47,37	2,690
Pemberdayaan Masyarakat	75	46,00	55,00	52,95	2,269

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

a. Akuntabilitas

Nilai untuk variabel akuntabilitas berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 18,00 dan nilai maximum sebesar 25,00. Sedangkan untuk rata-rata (mean) variabel akuntabilitas adalah 23,01 dengan std. Deviasi sebesar 2,09. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel akuntabilitas memiliki standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata (mean) . nilai standar yang lebih besar dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data kurang baik dan data bersifat heterogen atau beragam. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data sangat baik dan data bersifat heterogen atau beragam.

b. Transparansi

Nilai untuk variabel transparansi berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 20,00 dan nilai maximum sebesar 35,00. Sedangkan untuk rata-rata (mean) variabel transparansi adalah 30,45 dengan std. Deviasi sebesar 3,95. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel transparansi memiliki standar deviasi lebih kecil dari pada nilai

rata-rata (mean) . nilai standar yang lebih besar dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data kurang baik dan data bersifat heterogen atau beragam. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data sangat baik dan data bersifat heterogen atau beragam.

c. Partisipasi Masyarakat

Nilai untuk variabel partisipasi masyarakat berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai minimum sebesar 25,00 dan nilai maximum sebesar 30,00. Sedangkan untuk rata-rata (mean) variabel partisipasi masyarakat adalah 28,53 dengan std. Deviasi sebesar 1,45. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata (mean) . nilai standar yang lebih besar dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data kurang baik dan data bersifat heterogen atau beragam. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data sangat baik dan data bersifat heterogen atau beragam.

d. Pengelolaan

Nilai untuk variabel pengelolaan berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai minimum sebesar 48,00 dan nilai maximum sebesar 60,00. Sedangkan untuk rata-rata (mean) variabel pengelolaan adalah 56,49 dengan std. Deviasi sebesar 2,94. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengelolaan memiliki standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata (mean) . nilai standar yang lebih besar dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data kurang baik dan data bersifat heterogen atau beragam.

Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data sangat baik dan data bersifat heterogen atau beragam.

e. Alokasi Dana Desa

Nilai untuk variabel alokasi dana desa berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai minimum sebesar 40,00 dan nilai maximum sebesar 50,00. Sedangkan untuk rata-rata (mean) variabel alokasi dana desa adalah 47,37 dengan std. Deviasi sebesar 2,69. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel alokasi dana desa memiliki standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata (mean) . nilai standar yang lebih besar dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data kurang baik dan data bersifat heterogen atau beragam. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data sangat baik dan data bersifat heterogen atau beragam.

f. Pemberdayaan Masyarakat

Nilai untuk variabel pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai minimum sebesar 46,00 dan nilai maximum sebesar 55,00. Sedangkan untuk rata-rata (mean) variabel pemberdayaan masyarakat adalah 52,99 dengan std. Deviasi sebesar 2,26. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pemberdayaan masyarakat memiliki standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata (mean) . nilai standar yang lebih besar dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data kurang baik dan data bersifat heterogen atau beragam. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan variasi data sangat baik dan data bersifat heterogen atau beragam.

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yaitu bertujuan untuk mengukur sebuah konsistensi dari semua atau seluruh pertanyaan di dalam penelitian variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan, alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ dan jika *cronbach alpha* $< 0,60$ maka suatu konstruk atau variabel dikatakan tidak reliabel (Sugiyono, 2015).

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas	0,644	Reliable
2	Transparansi	0,653	Reliable
3	Partisipasi Masyarakat	0,667	Reliable
4	Pengelolaan	0,667	Reliable
5	Alokasi Dana Desa	0,797	Reliable
6	Pemberdayaan Masyarakat	0,654	Reliable

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keenam variabel penelitian mempunyai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang artinya untuk variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan, alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat setelah diteliti dapat dikatakan reliabel.

4.4.2 Uji Validitas

Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:57) ada dua konsep mengukur uji validitas yaitu realibilitas dan validitas. Hasil kualitas data yang dihasilkan

berdasarkan penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas ini peneliti melakukan dengan menghitung koefisien korelasi, dimana jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016:52). Dibawah ini merupakan hasil uji validitas masing-masing variabel sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1 Akuntabilitas	1	0,745	0,227	Valid
	2	0,357		Valid
	3	0,833		Valid
	4	0,294		Valid
	5	0,396		Valid
X2 Transparansi	1	0,607	0,227	Valid
	2	0,271		Valid
	3	0,719		Valid
	4	0,433		Valid
	5	0,607		Valid
	6	0,279		Valid
	7	0,733		Valid
X3 Partisipasi Masyarakat	1	0,627	0,227	Valid
	2	0,365		Valid
	3	0,687		Valid
	4	0,335		Valid
	5	0,404		Valid
	6	0,359		Valid
X4 Pengelolaan	1	0,427	0,227	Valid
	2	0,615		Valid
	3	0,482		Valid
	4	0,342		Valid
	5	0,288		Valid
	6	0,438		Valid
	7	0,319		Valid
	8	0,529		Valid
	9	0,543		Valid

	10	0,517		Valid
	11	0,644		Valid
	12	0,603		Valid
X5 Alokasi Dana Desa	1	0,733	0,227	Valid
	2	0,353		Valid
	3	0,648		Valid
	4	0,669		Valid
	5	0,743		Valid
	6	0,594		Valid
	7	0,547		Valid
	8	0,551		Valid
	9	0,605		Valid
	10	0,596		Valid
Y1 Pemberdayaan Masyarakat	1	0,344	0,227	Valid
	2	0,439		Valid
	3	0,466		Valid
	4	0,548		Valid
	5	0,642		Valid
	6	0,607		Valid
	7	0,603		Valid
	8	0,328		Valid
	9	0,391		Valid
	10	0,690		Valid
	11	0,566		Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Tabel di atas menunjukan maka hasil uji validitas data dari variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan serta alokasi dana desa, variabel dependen yaitu pemberdayaan masyarakat, seluruhnya memperoleh nilai r hitung $>$ r tabel. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan kuesioner dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah proses pengecekan didalam suatu model yang berregresi bebas dan variabel terkait yang berdistribusi normal. Verifikasi normalitas data didalam penelitian ini menggunakan sampel dari Kolmogorovskmirnov. Hasilnya seperti berikut;

Tabel 4.15

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.09138284
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positif	.112
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.006 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.181 ^d

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.15 diatas pada uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa data yang di dapat tersebut mengikuti distribusi normal. Berdasarkan hasil output menunjukkan nilai Kolmogorov smirnov signifikan pada $0,181 > 0,05$ untuk variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, peneglolaan serta alokasi dana desa. Karena itu, nilai, residualnya berterdistribusi normal, dan untuk model regresi melengkapiasumsi normalisasi.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Jika model regresi baik, maka tidak ada korelasi dengan variabel bebas. Pencarian ini menggunakan nilai toleransi dan vif untuk mengeceknya. Jika toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai vif kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.16
Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constanta)	18.552	3.802			
	Akuntabilitas	-0.036	0.083	-0.034	0.577	1.732
	Transparansi	0.012	0.041	0.021	0.644	1.553
	Partisipasi Masyarakat	-0.314	0.115	-0.202	0.613	1.633
	Pengelolaan	0.569	0.071	0.737	0.398	2.510
	Alokasi Dana Desa	0.248	0.079	0.294	0.381	2.623

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel independen diatas 0,1 yaitu sebesar 0.577, 0.644, 0.613, 0.398, 0.381 untuk variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, penelolaan serta alokasi dana desa untuk nilai Variance Inflation Factor (VIF) yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipai, masyarakat, pengelolaan dan alokasi dana desa sebesar 1.732, 1.553, 1.633, 2.510, 2.623 atau kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas juga menggunakan metode statistik dengan uji glester. Uji glester mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Ketentuan dalam uji glejster adalah :

- Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas

Tabel 4.17
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independent	T	Sig.
(Constant)	.375	.709
Akuntabilitas	.915	.363
Transparansi	1,418	.161
Partisipasi Masyarakat	.336	.738
Pengelolaan	-.991	.325
Alokasi Dana Desa	-.217	.829

Sumber : Data Primer Yang diolah, 3021

Berdasarkan dari hasil tabel diatas pemeriksaan Heteroskedastisitas dalam melakukan penelitiannya menggunakan uji Glejser. Hasilnya uji statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel bebasnya yaitu $> 0,05$ atau $X_1 = 0,363$; $X_2 = 0,161$; $X_3 = 0,738$; $X_4 = 0,325$; $X_5 = 0,829$ dari hasil diatas membuktikan bahwa model regresinya tidak memiliki varians variabel. Oleh karena itu, model regresi penelitian ini layak untuk memprediksi faktor yang mungkin mempengaruhi pemberdayaan masyarakat.

4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah pengujian yang digunakan untuk menguji hubungan linier dua atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Untuk melihat dampak akuntabilitass (x1), transparansi (x2), partisipasi masyarakat (x3), pengelolaan (x4), alokasi dana desa (x5) dan pemberdayaan mayarakat (Y). Output regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Regresi Linier Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	18.552	3.802
	Akuntabilitas	-0.036	0.083
	Transparansi	0.012	0.041
	Partisipasi Masyarakat	-0.314	0.115
	Pengelolaan	0.569	0.071
	Alokasi Dana Desa	0.248	0.079

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

a. *Dependent Variabel: Pemberdayaan Masyarakat*

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai konstanta (α) sebesar 18.552 Nilai konstanta pada variabel akuntabilitas ($\beta_1 X_1$) adalah -0,036 nilai konstanta pada variabel transparansi ($\beta_2 X_2$) sebesar 0,012 pada variabel partisipasi masyarakat ($\beta_3 X_3$) sebesar -0,314 pada variabel pengelolaan ($\beta_4 X_4$) sebesar 0,569 dan pada variabel alokasi dana desa ($\beta_5 X_5$) sebesar 0,248 . Maka, model kemiripan regresi linier berganda yaitu seperti dibawah ini:

$$Y = 18.552 - 0,036X_1 + 0,012X_2 - 0,314X_3 + 0,569X_4 + 0,248X_5$$

Keterangan:

Y : Pemberdayaan Masyarakat

X1 : Akuntabilitas

X2 : Transparansi

X3 : Partisipasi Masyarakat

X4 : Pengelolaan

X5 : Alokasi Dana Desa

Berdasarkan kemiripan regresi linier diatas, dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Nilai konstanta pemberdayaan masyarakat (Y) adalah 18,552 yang menunjukkan bahwa jika variabelnya adalah akuntabilitas (X1), transparansi (X2), partisipasi masyarakat (X3), tata kelola (X) dan alokasi dana desa (X5) diabaikan atau nol, maka nilai akuntabilitasnya masih 18.552.
2. Nilai koefisien variabel akuntabilitas sebesar (-0,036). Tanda negatif menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang tidak searah dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan variabel pemanfaatan akuntabilitas sebesar 1%, maka akan menurunkan pemberdayaan masyarakat sebesar 3,6% .
3. Nilai koefisien variabel transparansi sebesar 0,012 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan variabel transparansi sebesar 1% akan menaikkan pemberdayaan masyarakat sebesar 1,2%.
4. Nilai koefisien variabel partisipasi masyarakat sebesar (-0,314). Tanda negatif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang tidak searah dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa

setiap kenaikan variabel pemanfaatan pemberdayaan masyarakat sebesar 1%, maka akan menurunkan pemberdayaan masyarakat sebesar 31% .

5. Nilai koefisien variabel pengelolaan sebesar 0,569 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan akuntabilitas sebesar 1% maka akan menaikkan pemberdayaan masyarakat sebesar 56,9%.
6. Nilai koefisien variabel alokasi dana desa sebesar 0,248 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan alokasi dana desa sebesar 1% maka akan menaikkan pemberdayaan masyarakat sebesar 24,8%.

4.7 Pengujian Hipotesis

4.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Pengujian parsial (uji t) digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), partisipasi masyarakat (X3), pengelolaan (X4), ADD (X5) terhadap variabel pemberdayaan masyarakat (Y) secara parsial. Hasil t hitung secara terperinci dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.19

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.552	3.802		4.879	.000
	Akuntabilitas	-0.036	0.083	-0.034	-0.442	0.660
	Transparansi	0.012	0.041	0.021	0.293	0.770
	Partisipasi	-0.314	0.115	-0.202	-2.724	0.008

Masyarakat						
Pengelolaan	0.569	0.071	0.737	8.038	0,000	
Alokasi Dana Desa	0.248	0.079	0.294	3.136	0.003	

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel .19 di atas, hasil uji-t penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan pada tabel diatas, menjelaskan bahwa nilai sig. Variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,660 ($>0,05$) dan nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,442. Dengan demikian H_a ditolak dan H_o diterima, yang artinya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) ditolak “Akuntabilitas berpengaruh negative terhadap pemberdayaan masyarakat”

2. Transparansi terhadap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan pada tabel diatas, menjelaskan bahwa nilai sig. Variabel transparansi (X2) sebesar 0,770 ($>0,05$) dan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,293. Dengan demikian H_a ditolak dan H_o diterima, yang artinya transparansi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu disimpulkan bahwa hipotesis (H_2) ditolak “Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat”.

3. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pada tabel diatas, menjelaskan bahwa nilai sig. Variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,008 ($>0,05$) dan nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -2,724. Dengan demikian H_a ditolak dan H_o diterima,

yang artinya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Kesimpulanya bahwa hipotesis (H3) ditolak. “Partisipasi masyarakat berpengaruh negative terhadap pemberdayaan masyarakat”.

4. Pengelolaan terhadap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan pada tabel diatas, menjelaskan bahwa nilai sig. Variabel pengelolaan (X4) sebesar 0,000 ($<0,05$) dan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 8,038. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H4) diterima sehingga hipotesisnya berbunyi. “Pengelolaan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat”.

5. Alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa nilai sig. Variabel alokasi dana desa (X5) sebesar 0,003 ($<0,05$) dan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 3,316. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H5) diterima sehingga hipotesisnya berbunyi. “alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat”.

4.7.2 Uji F

Uji F yaitu menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel- variabel bebas secara bersama-sama (simultan) dalam menerangkan variasi variabel terikat. Didalam pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai

signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu sebaliknya. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.20
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	292.844	5	58.569	45.849	.000 ^b
	Residual	88.143	69	1.277		
	Total	380.987	74			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dari hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 5,8 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu dari nilai F positifnya, nilai signifikannya kurang dari 0,05 lalu hipotesis yang dikemukakan adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan serta alokasi dana desa berdampak positif signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, sehingga diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model didalam menerangkan variabel-variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipais masyarakat, pengelolaan dan pengelolaan alokasi dana desa dalam menjelaskan variasi variabel dependen

yaitu pemberdayaan masyarakat. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai *R Adjusted Square* pada tabel dibawah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.877 ^a	.769	.752	1.130	.877 ^a

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Nilai *Adjusted R Square* variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan serta alokasi dana desa sebesar 0.752 atau 75, 2%. Membuktikan bahwa 75,2% dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan dan alokasi dana desa, dan sisanya 24,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pembahasan

Penelitian ini mencoba untuk menginvestigasi hal-hal yang diduga mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan serta alokasi dana desa.

4.7.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?

Hasil uji hipotesis (uji t) mengenai pengaruh antara akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas yakni merupakan kewajiban tentang kinerja manajemen sumber daya serta implementasi telah dipercayakan bagi entitas didalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil

eksperimen, variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, berarti untuk hipotesisnya ditolak. Hal ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rina Indrawati Syafi'i, Dkk. 2018 yang dilakukan di desa Pundungsari, yang berada dikecamatan tempursari, kabupaten lumajang) tidak berdampak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas dalam hal ini adalah laporan pengelolaan dana desa sebagai sumber informasi bagi pemerintah kota untuk mengetahui hasil penggunaan dan anggaran desa. Dalam praktiknya, akuntabilitas dicapai dengan memasang spanduk pengumuman yang berisi laporan penggalangan dana desa lokal di Bali untuk tujuan akuntabilitas masyarakat. Fenomena yang terjadi di wilayah Lebang Kabupaten Batang menunjukkan bahwa akuntabilitas sudah cukup, tetapi petani mungkin tidak memahami mekanisme yang terlibat, sehingga jika masyarakat pedesaan berada di wilayah pinggiran lainnya, masyarakat belum merasakan konsekuensi dari akuntabilitas ini. Karena kota mendelegasikan seluruh pengelolaan dana desa kepada aparat desa sebagai agen, maka dirasa tidak penting untuk mengetahui laporan penggunaan dana desa. Hanya mereka yang mengelola dana desa dan terlibat dalam alokasi dana desa (penganggaran) dan pengambil keputusan mengenai pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab.

Penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari (Putri et al., 2020) sebelumnya. Dalam penelitiannya (Putri et al., 2020) mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

4.7.4 Pengaruh Transparansi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?

Hasil pengujian hipotesis (uji-t) terhadap pengaruh transparansi dan pemberdayaan masyarakat. Transparansi merupakan bagian yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa, dengan adanya transparansi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar serta lengkap, tanpa membiarkan adanya asimetri antara keduanya. Dengan adanya keterbukaan terhadap informasi serta partisipasi masyarakat desa di dalam musyawarah desa, program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi kenyataan. Berdasarkan hasil eksperimen, variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, hipotesisnya ditolak. Pernyataan dari hasil diatas menyatakan bahwasanya hasil penelitiannya tidak searah dengan penelitaian yang telah dilakuakn (Putri et al., 2020) sebelumnya, di dalam penelitiannya (Putri et al., 2020) yang mlaim bahwa transparansi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini transparansi engak membawa dampak atau pengaruh positif kepada pemerintahan desa dan transparansi pemerintah dalam pengambilan kebijakan tidak diketahui publik. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, mengakibatkan kurangnya sosialisasi berbagai produk hukum dan kurangnya transparansi, meningkatkan pelanggaran hukum. Hal ini berdasarkan hasil eksperimen bahwa transparansi pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan karena thitung dan ttabel adalah 0,770 ($0 > 0,05$) serta nilai koefisiennya regresinya positif 0,293. Dan rata - rata indeks respon untuk variabel transparansi yang diperoleh adalah 0,35. Berdasarkan jenis skor indikator metode tiga sel, rata-rata skor berada pada kategori rata-rata.

Dengan transparansi, akan ada rasa saling percaya anatar 2 belah pihak yaitu pemerintahan desa dengan masyarakat.

Penelitian ini searah dengan temuan (Sukmawati et al., 2019). Pada penelitiannya (Sukmawati et al., 2020), ia menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan pada pemerintah desa Kabupaten Garut menunjukkan bahwa transparansi tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

4.7.5 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?

Hasil uji hipotesis (uji t) tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan. Partisipasi sangat penting dalam upaya buat mencapai sebuah tujuan dari dana desa itu sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana keterlibatan masyarakat tercapai buat menjadikan masyarakat lebih mandiri kembali. Berdasarkan hasil eksperimen, variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif serta signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, yang berarti untuk hipotesisnya ditolak. Hal ini tidak searah sama penelitian (Putri et al., 2020) yang menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, hasil eksperimen membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan karena thitung dan ttabel 0,008 (& $<0,05$) serta nilai koefisiennya regresi 0,008 ditetapkan positif sebesar 2,72. Maka dari itu H_a diterima sedangkan H_o ditolak yang berarti partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap

pemberdayaan masyarakat. Faktor yang mendorong rendahnya partisipasi yaitu dipengaruhi oleh usia kerja dengan jenjang pendidikan SLTA ke atas Sementara partisipasi pemilih rendah di distrik pinggiran kota, hal itu dipengaruhi oleh usia produksi, tingkat pendidikan dasar, orang-orang dengan pekerjaan petani dan tingkat pendapatan. Hasil angket yang diperoleh menunjukkan bahwa responden menilai partisipasi masyarakat di wilayahnya sudah baik. Hal ini berdasarkan dari sekor rata-rata Community Engagement Response Index sebesar ,75. Berdasarkan jenis skor indikator metode tiga kotak, rata-rata skor termasuk dalam kategori atas. Partisipasi yang penting buat mencapai tujuan dana desa itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat, sedangkan peran serta masyarakat bertujuan agar masyarakat petani lebih mandiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umi Listyaningsih, 2016). Dalam sebuah penelitiannya (Umi Listyaningsih, 2016) membuktikan bahwasanya penelitian yang dilakukan di pedesaan Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta menyatakan bahwasanya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian hak bagi masyarakat.

4.7.6 Pengaruh Pengelolaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?

Hasil uji hipotesis (uji-t) berkaitan dengan pengelolaan pemberdayaan masyarakat. Manajemen adalah kumpulan aktivitas, pekerjaan atau upaya yang dilaksanakan oleh suatu gabungan buat melaksanakan suatu pekerjaan sampai selesai dalam rangka memenuhi suatu rencana. Berdasarkan hasil eksperimen, variabel manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan

masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya diterima. Pernyataan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faizatul Karimah et al., 2020), membuktikan bahwasanya pengelolaan tidak berdampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian didukung oleh koefisien regresi sebanyak 0,569 artinya setiap kenaikan 1% alokasi dana desa meningkatkan keberdayaan masyarakat sebanyak 56,9 dengan asumsi variabel lainnya konstan (konstan). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dikecamatan reban kabupaten Batang digambarkan dengan hasil perhitungan statistik deskriptif pada Std. Penyimpangan sebesar 1, 55 dan uji reliabilitas sebesar 0,667 yang berarti partisipasi masyarakat reliabel. Kemudian, hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan karena t-hitung dan t-tabel sebesar 0,000(<0,05) dan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 8,038. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Li (2010). Didalam penelitiannya tersebut Li (2010) menyatakan pengelolaan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

4.7.7 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat?

Hasil uji hipotesis (uji t) menyatakan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. untuk kedaulatan daerahnya sendiri, terutama untuk

membangun kepercayaan desa di daerahnya, serta berusaha mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan desa didalam rangka pemberdayaan masyarakat buat mensejahterakan masyarakatnya di sebuah desa. Berdasarkan hasil pengujian alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwasanya hipotesis diterima. Hal ini tidak sepatutnya pakai pemeriksaan yang dilakukan oleh (Sari et al., 2015) menyatakan bahwasanya alokasi dana desa tidak berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Maka koefisien korelasi sebesar. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang berada dikecamatan Reban, Pemerintah Kabupaten Batang digambarkan melalui perhitungan koefisien determinasi (KD) sebesar 75,2%, sedangkan lebihnya dinyatakan nilai epsilon (ϵ) sebanyak 2,8% dipengaruhi oleh variabel lain - lainya. faktor bagi peran pemerintah, dll. Kemudian hasil eksperimen memperlihatkan bahwasanya alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk nilai thitung serta t tabel sebesar 0,003 ($<0,05$) dan nilai koefisien regresinya positif sebesar 3,316. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak, artinya alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian dilakukan oleh (Sopian et al., 2019). Dalam penelitiannya (Sopian et al., 2019) menyatakan bahwa alokasi dana desa berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas. Dari hasil pengujian menggunakan SPSS sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap naik maupun turunnya tingkat pemberdayaan masyarakat.
2. Transparansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi suatu transparansi peneglolaan dana desa maka kekuatannya terhadap masyarakat akan lebih meningkat, namun jika tingkat transparansi pegelolaan dana desa rendah maka untuk pemberdayaan masyarakatnya juga akan berkurang.
3. Partisipasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Memperlihatkan bahwasanya partisipasi masyarakat engak berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan tingkat pemberdayaan masyarakat
4. **Pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.** Jika pengelolaanya lebih tinggi maka pemberdayaan masyarakat akan meningkat, tetapi kalau pengelolaan dikurangi pemberdayaan masyarakat akan menurun.

5. Alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat alokasi dana desa maka kekuatan masyarakat tentu bertambah, sedangkan makin rendah alokasi dana desa maka pemberdayaan masyarakat tentu semakin berkurang.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan – keterbatasan, berikut ini keterbatasan – keterbatasan dalam penelitian ini:

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel – sampel pada aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Reban Kabupaten Batang, hal ini menyebabkan hasil – hasil penelitian ini tidak bisa menggambarkan kondisi pemerintahan secara umum. Penelitian ini juga memiliki berbagai keterbatasan karena variabel yang diteliti hanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan dan alokasi dan desa sedangkan ada variabel lain yang perlu dipertimbangkan untuk diuji berdampak pada pemberdayaan masyarakat seperti penyelenggara. Dalam penelitian ini, peneliti memakai cara dalam mengumpulkan data berbentuk angket serta data kognitif yang ditemukan dari responden berupa tanggapan yang berisi kemungkinan hasil dari jawaban lain dengan keadaan yang sebenarnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan :

1.1.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat meningkatkan fakta tentang kontribusi ajaran serta penelitian menjadi acuan pelengkap dalam kaitannya atas penelitian akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan, alokasi dana desa serta pemberdayaan masyarakat.

1.1.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini peneliti memiliki Pemerintah Desa Kecamatan Reban Kabupaten Batang sebagai respondent. Diharapkan didalam penelitian selanjutnya, penelitian lain menggunakan populasi yang lebih besar daripada penelitian ini, selain itu bisa menambahkan variabel penelitian seperti komitmen organisasi bertujuan untuk mengetahui kompetensi – kompetensi sebuah organisasi dilingungkan pemerintah desa. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menambahkan teknik pengambilan data dengan metode wawancara dan dokumentasi agar meningkatkan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan.

5.2.1 Bagi Pemerintah Desa

Bagai masyarakat desa khususnya yang berada di Kecamatan Reban kabupaten Batang sebaiknya dilakukan pembinaan yang lebih baik terkait, akuntabilitas,transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan dan alokai dana desa, guna meningkatkan pemerdayaan masyarakat yang beradada dikecamatan reban, kabupaten batang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ayu Anggreni Putri, I. W. S., & Samtika, I. P. D. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SONGAN B KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- (Agung Maulana, 2019) Agung Maulana, A. R. Z. H. A. (2019). *Pengelolaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat: perspektif maqashid syariah*. 9(1), 68–84.
- “(Aria H, 2019) Aria H, G. I. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua). *Journal of Sanata Dharma*, 53(9), 1689–1699.
- (Auliana et al., 2013) Auliana, R., Sendjaja, S. D. P. D., Kirana, V. N., Pada, K., Universitas, K., Ut, T., Ii, B. A. B., Pustaka, T., Francisco, A. R. L., Yusuf, D. M., goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A., Anggraeni, nita D., U, M. P. M. A. D., Ii, B. A. B., Manajemen, P., Daya, S., Iii, B. A. B., Ii, B. A. B., Unitex, P. T., ... Siagian. (2013). BAB III METODE PENELITIAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. [http://jurnal.unmer.ac.id/jbm/article/download/70/11%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/5617/6/BAB III nita revisi.pdf%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5617%0A%0Ahttp://repository.ut.ac.id/4408/2/SKOM4101-M1.pdf](http://jurnal.unmer.ac.id/jbm/article/download/70/11%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/5617/6/BAB%20III%20nita%20revisi.pdf%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5617%0A%0Ahttp://repository.ut.ac.id/4408/2/SKOM4101-M1.pdf)
- (Bansode et al., 2018) Bansode, R. S., Tas, R., Tanriover, O. O., IOTC, Alam, K. M., Ashfiquir Rahman, J. M., Tasnim, A., Akther, A., Mathijsen, D., Sadouskaya, K., Division, C. T., Chen, Y. H., Chen, S. H., Lin, I. C., Buterin, V., Gu, Y., Hou, D., Wu, X., Tao, J., ... Miraz, M. H. (2018). No ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala- Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina). *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand>
- (Boedijono et al., 2019) Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- (Dewi, n.d.) Dewi, N. S. (n.d.). No TitleS URAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. 2018, 148, 148–162.
- (Dies Nurhayati, 2017) Dies Nurhayati, M. P. (2017). Efektivitas Pengelolaan

- Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12.
- (EKA LESTARI NomorJargalsaikhan et al., 2019)EKA LESTARI NomorJargalsaikhan, B. E., Ganbaatar, N., Urtnasan, M., Uranbileg, N., Begzsuren, D., Patil, K. R., Mahajan, U. B., Unger, B. S., Goyal, S. N., Belemkar, S., Surana, S. J., Ojha, S., Patil, C. R., Mansouri, M. T., Hemmati, A. A., Naghizadeh, B., Mard, S. A., Rezaie, A., Ghorbanzadeh, B., ... Yuanita, E. (2019). PENGARUH PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM P2WKSS DI KELURAHAN KALUMEME KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA. *Molecules*, 9(1), 148–162. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Erni Tahir. (2018) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus pada desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi).
- (Juliansyah Noor, 2019)Juliansyah Noor. (2019). METODE PENELITIAN . *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- (Fay, 2019)Fay, D. L. (2019). BAB III METODE PENELITIAN 3.1. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 33–42.
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, I. W. (2020). *PENGLOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. 2(4), 597–602.
- (Febri Arifiyanto & Kurrohman, 2014)Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (Ghozali, 2018)Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- “(Hariyani, 2018)”.Hariyani, D. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- (HILYA „IZZAHBansode et al., 2018)HILYA „IZZAHBansode, R. S., Tas, R., Tanrioer, O. O., IOTC, Alam, K. M., Ashfiquir Rahman, J. M., Tasnim, A., Akther, A., Mathijsen, D., Sadouskaya, K., Division, C. T., Chen, Y. H., Chen, S. H., Lin, I. C., Buterin, V., Gu, Y., Hou, D., Wu, X., Tao, J., ... Miraz, M. H. (2018). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi

- Kasus di Desa Pagaran Gala- Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina). *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand>
- (Hutagalung, 1967)Hutagalung, A. (1967). BAB III METODE PENELITIAN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- (Irma, 2015)Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(1), 121–137.
- Kede, E. E. R. (2019). *PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA PANDANREJO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU)*. 8(4), 333–337.
- “(Lakip, 2013)Lakip. (2013). *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di pada tahun 2013 untuk mencapai sasaran : a . Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan b . Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Berikut capaian kinerja masing-masing sasaran yang terjabar dalam beberapa*. 155–158.
- (Ii, 2010)Ii B. A. B. (2010). *Bab ii kerangka pemikiran 2.1*. 1968, 9–18.
- (M. INDRA MAULANA, 2018)M. INDRA MAULANA. (2018). *Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam*. Ninla Elmawati Falabiba. (2019). BAB III METODE PENELITIAN. 29–42."
- (Pane et al., 2018)Pane, D. N., Fikri, M. EL, & Ritonga, H. M. (2018). BAB III METODE PENELITIAN 1.1. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Prasitnok, K., Bulacu, M., Shen, Z., Ye, H., Zhou, C., Kröger, M., Li, Y. Y., Fonner, E., Drph, J., Acid, P., Grunewald, F., Rossi, G., De Vries, A. H., Marrink, S. J., Monticelli, L., Jiang, J. W., Wang, J. S., Li, B., Mukherjee, A. K., ... Cho, K. (2017). No TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)DI DESA SEKUNYIT KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR. *TERY DINAYANDRA*, 8(1), 28–48. [https://doi.org/10.1016/S0009-2614\(00\)00764-8](https://doi.org/10.1016/S0009-2614(00)00764-8)
- “(Rina Indrawati Syafi’i, 2018)Rina Indrawati Syafi’i, A. W. M. dan A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- (Risya Novita Sari, Heru Ribawanto & Brawijaya, 2015)Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, M. S., & Brawijaya, U. (2015). *PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)*. 3(11), 1880–1885.
- (Sari, 2018)Sari, M. Y. dan P. H. A. F. (2018). *Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat*. 1–25.

- Siti Wahyuni Ramadhani¹, H. Achmad Murodi, Drs., MM2, Hari Muljono, Drs., M. (2019). *PENGARUH EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG (Studi Kasus*
- “(Sitorus, 2014)Sitorus, N. I. B. (2014). *Analisis Efektivitas Corporate Social Responsibility sapu Lidi Cafe, Resort, And Gallery Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat*. 1–10.
- pada Desa Babakan Asem, Desa Keboncau, Desa Kampung Melayu Timur). September.
- Sopian, A. A. F. A., Ekonomi, F., Studi, P., Universitas, A., Bandung, B., Desa, P., Dusun, K., & Masyarakat, P. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. 10, 41–57.
- (Sugiyono, 2016)Sugiyono. (2016). Definisi dan Operasional Variabel Penelitian. *Definisi Dan Operasional Variabel Penelitian*, 41–70.
- Sugiyono, universitas negeri. (2015). metode penelitian bab III. *Biomass Chem Eng*, 49(23–6), 40–68. https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS_BAB_III_13416241020.pdf
- (Sugiyono, 2013)Sugiyono. (2013). Metode Dan Teknik Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukmawati, Fitri & Alfi Nurfitriani. 2019. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut).” *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan Umkm*, 2(1): 52-66.
- Umi Listyaningsih, A. N. (2016). *TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM FISIK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULONPROGO, YOGYAKARTA* Agus. July, 1–23.
- (& Wolfman, 2013)& Wolfman, L. S. B. A. (2013). BAB II TINJAUAN PUSTAKA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- (Waladiyah, 2018)Waladiyah, U. (2018). *Kuesioner Waladiyah*.
- Yamulia Hulu, R. H. H. & Muhammad A. N. (2018). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Yamulia*. 10(1), 146–154.
- (Yulius Ferdinand Noel Nusi Dr. M. Yamin Noch, SE. & Victor Pattiasina, SE., Akt., M.SA., 2016)Yulius Ferdinand Noel Nusi Dr. M. Yamin Noch, SE., M. S., & Victor Pattiasina, SE., Akt., M.SA., C. (2016). *ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA FAFAI DISTRIK DEMBA KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2015-2016*.